



Rencana Kerja Dinas Kesehatan

**TAHUN
2022**

**PEMERINTAH
KOTA CIMAHI**



KOMPLEK PERKANTORAN PEMKOT CIMAHI GEDUNG C LANTAI III
JL. RD. DEMANG HARJAKUSUMAH
TELP./FAX 022-6632197
KOTA CIMAHI



[HTTPS://DINKES.CIMAHIKOTA.GO.ID/](https://dinkes.cimahikota.go.id/)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Cimahi dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahun 2022 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil capaian indikator kinerja yang digunakan, permasalahan yang dihadapi, serta usulan dari masyarakat pada saat Musrenbang. Rencana Kerja Tahun 2022 juga memperhatikan pada Rencana Srategis Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2017-2022.

Rencana Kerja 2022 ini tersusun atas kerjasama tim penyusun di jajaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran dalam rangka penyusunan rencana kerja dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyajian Rencana Kerja ini tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Ucapan termakasih dan penghargaan kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak dalam penyusunan rencana kerja ini.

Cimahi, 22 November 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI**



drg. PRATIWI, M.Kes
NIP. 196206191989012001

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | i |
| DAFTAR TABEL..... | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. DASAR HUKUM | 3 |
| C. MAKSUD DAN TUJUAN..... | 6 |
| 1. Maksud | 6 |
| 2. Tujuan..... | 6 |
| D. SISTEMATIKA PENULISAN | 6 |
| BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 | 8 |
| A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2020..... | 8 |
| B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.... | 43 |
| C. ISU STRATEGIS | 45 |
| 1. Masih Adanya Kematian Ibu dan Bayi | 45 |
| 2. Belum Tercapainya Target SPM Bidang Kesehatan..... | 46 |
| 3. Stunting Pada Balita..... | 47 |
| 4. Meningkatnya Kasus Penyakit Menular Dan Tidak Menular. | 48 |
| 5. Pandemi COVID-19..... | 48 |
| 6. Belum Optimalnya Pembiayaan Kesehatan | 49 |
| D. TELAAH TERHADAP USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT | 50 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH..... | 53 |
| A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL..... | 53 |
| B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.... | 54 |
| C. PROGRAM DAN KEGIATAN | 57 |
| 1. Strategi..... | 59 |
| 2. Kebijakan | 60 |
| 3. Program, Kegiatan | 61 |

| | |
|---|-----|
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... | 96 |
| BAB V PENUTUP..... | 144 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2. 1 Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2020 | 8 |
| Tabel 2. 2 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2020 berdasarkan Sumber Anggaran..... | 9 |
| Tabel 2. 3 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2020 berdasarkan Program..... | 9 |
| Tabel 2. 4 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2020 berdasarkan Sumber Anggaran | 10 |
| Tabel 2. 5 Rencana Program Kegiatan dan Realisasi Tahun 2020 ... | 12 |
| Tabel 2. 6 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | 25 |
| Tabel 2. 7 Indikator Kinerja Utama tahun 2020..... | 43 |
| Tabel 2. 8 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2018-2020..... | 44 |
| Tabel 2. 9 Usulan Musrenbang Bidang Kesehatan Tahun 2022 | 50 |
| Tabel 2. 10 Sinkronisasi usulan Musrenbang Kecamatan dengan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022 | 51 |
| Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2022..... | 57 |
| Tabel 3. 2 Capaian Indikator SDGs terkait Bidang Kesehatan Tahun 2019-2020 | 58 |
| Tabel 4. 1 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2022 berdasarkan Sumber Anggaran..... | 96 |
| Tabel 4. 2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 berdasarkan RKPD..... | 97 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2. 1 Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Kota Cimahi Tahun 2015-2020 | 46 |
|--|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2022 merupakan salah satu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Dinas Kesehatan disusun mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cimahi tahun 2021 dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja SKPD untuk menterjemahkan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Dalam sistem perencanaan daerah, rencana kerja SKPD mempunyai fungsi penting karena merupakan perencanaan pada unit organisasi terkecil di pemerintahan daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi. Penyusunan Renja SKPD dilaksanakan melalui 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antara usulan tingkat kelurahan dan kecamatan, kegiatan yang disusun di tingkat Dinas serta kajian di tingkat Kota, dan juga mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan lainnya baik itu yang diusulkan melalui APBD Kota, usulan ke Provinsi maupun ke tingkat pusat.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistiktematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur / bagian / kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Penyusunan dokumen rancangan Renja 2022 ini, mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa Renja SKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir Renja dan penetapan Renja.

Awal tahun 2020 seluruh dunia dihadapkan pada kasus pandemi Corona Virus Desease (Covid-19). Wabah ini memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap berbagai sendi kehidupan. Dalam kaitan dengan pelaksanaan pemerintahan, akibat dari wabah ini mempengaruhi proses penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh program dan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen perencanaan tahun 2020, begitu pula dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan 2022 ini tentunya harus memperhatikan berbagai kebijakan dan peraturan yang harus diakomodir oleh pemerintah baik di tingkat provinsi maupun pemerintah daerah di kabupaten dan kota dalam penanggulangan wabah tersebut.

Imbas pandemi COVID-19, saat ini pemerintah pusat, provinsi dan daerah masih tetap fokus pada penanganan dan penanggulangan COVID-19 serta pemulihan ekonomi. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Pusat untuk tahun 2022 masih mencakup pada tujuh prioritas nasional sesuai RPJMN 2020-2024 yakni penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah,

peningkatan sumber daya manusia, peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Selain itu, penguatan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta perubahan iklim, kemudian stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Ketujuh prioritas nasional tersebut akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terpadu dan terintegrasi sesuai RKP tahun 2021.

Seluruh strategi tersebut dapat disusun dalam dokumen perencanaan daerah yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya di tahun 2022. Dengan adanya dokumen Renja Dinas Kesehatan tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mencapai tujuan untuk mengembalikan kepada kondisi yang lebih baik dari tahun 2021, sehingga tujuan pembangunan kesehatan dapat tetap tercapai sesuai dengan rencana.

B. DASAR HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2022 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
 16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
 17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 207);
 18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 278);
 19. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
 20. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
 21. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022

(Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 630 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Menjabarkan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yaitu dua tahun terakhir dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022.

2. Tujuan

- a. Melakukan analisis kinerja pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2020 terhadap indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Mengakomodir berbagai kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan proses pembangunan bidang kesehatan di Kota Cimahi khususnya dan pembangunan kesehatan di Indonesia.
- c. Memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan sehingga pencapaian target tahunan RENSTRA dan RPJMD dapat dipastikan.
- d. Dokumen Rencana Kerja sebagai instrument akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja tahun 2022.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2022 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- C. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
- D. Telaah Terhadap Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

- A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

- A. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2020

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020 ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengukur sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program serta kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program serta kegiatan dalam renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan di tahun 2020. Pada tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Cimahi mengelola Anggaran dari berbagai sumber antara lain anggaran yang bersumber dari APBD Kota Cimahi, APBD Provinsi dan APBN dengan total anggaran sebesar Rp. 128.074.136.291,- yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 93.569.980.291,- (73.05%) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 34.504.156.000,- (26.94%). Adapun rincian lengkap untuk anggaran tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2020

| NO | JENIS BELANJA | ANGGARAN (Rp) |
|----|------------------------|-------------------|
| 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 34.504.156.000,- |
| 2 | BELANJA LANGSUNG | 93.569.980.291,- |
| | TOTAL | 128.074.136.291,- |

Anggaran Belanja Langsung digunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Bidang, Sekretariat dan 13 (tiga belas) Puskesmas selama tahun 2020. Sumber anggaran berasal dari APBN (DAK Fisik dan DAK Non Fisik) APBD Provinsi (40% Premi iuran PBI Daerah integrasi dengan JKN) dan APBD Kota Cimahi serta Dana Kapitasi JKN bagi 13 Puskesmas. Adapun untuk rincian pagu anggaran Dinas Kesehatan tahun 2020 berdasarkan sumber anggaran ada pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 2 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2020 berdasarkan Sumber Anggaran

| NO | SUMBER ANGGARAN | PAGU ANGGARAN (Rp) | % |
|----|------------------|--------------------------|---------------|
| 1. | APBN | 33.613.160.000,- | 26,24 |
| | a. DAK FISIK | 7.634.546.000,- | |
| | b. DAK NON FISIK | 24.308.424.630,- | |
| | c. DID | 1.670.190.250,- | |
| 2. | APBD PROVINSI | 9.676.800.000,- | 7,55 |
| 3. | APBD KOTA | 61.303.780.222,- | 47,86 |
| 4. | KAPITASI JKN | 18.803.876.947,- | 14,68 |
| 5. | DBHCHT | 4.675.333.242,- | 3,65 |
| | TOTAL | 128.072.951.291,- | 100,00 |

Berdasarkan tabel diatas prosentase sumber anggaran terbesar berasal dari anggaran APBD Kota Cimahi (47.86 %), anggaran kapitasi JKN di Puskesmas (14,68 %). Sementara itu anggaran yang berasal dari APBD Provinsi sebesar 7,55%, sedangkan anggaran yang berasal dari pusat/APBN pada tahun 2020 yang dikelola oleh Dinas Kesehatan sebesar 26.24 %.

Anggaran sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan program dan kegiatan di bidang dan sekretariat serta di 13 Puskesmas. Pada tahun 2020 jumlah program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebanyak 6 program yaitu 3 program di Bidang dan 3 program yang dilaksanakan oleh Sekretariat. Adapun jumlah besaran anggaran di bidang sebanyak Rp. 89.556.613.461,- dan di sekretariat sebesar Rp. 4.013.366.830,-. Berikut tabel anggaran Dinas Kesehatan berdasarkan program yang dikelola pada tahun 2020.

Tabel 2. 3 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2020 berdasarkan Program

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| BIDANG | | 89.556.613.461,- |
| 1. | Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan | 27.672.976.350,- |
| 2. | Program Pengembangan Pembiayaan Kesehatan | 50.829.149.345,- |
| 3. | Program Peningkatan Kualitas Penyediaan Pelayanan Kesehatan | 11.054.487.766,- |
| SEKRETARIAT (PENDUKUNG) | | 4.013.366.830,- |
| 5. | Program peningkatan sarana dan | 3.877.179.330,- |

| | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|
| | prasarana aparatur | |
| 6. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 75.937.500,- |
| 7. | Program peningkatan kapasitas aparatur sipil negara | 60.250.000,- |
| TOTAL (BIDANG + SEKRETARIAT) | | 93.569.980.291 |

Anggaran belanja langsung tahun 2020 sebesar Rp. 93.569.980.291,-, realisasi terhadap program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp. 75.925.097.602,- atau 81,14% naik 1.54% dari tahun 2019 (79,60%). Adapun rincian realisasi anggaran per program dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 4 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2020 berdasarkan Sumber Anggaran

| NO | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | REALISASI | |
|------------------------|--|------------------|------------------|--------|
| | | | RP | % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | | 34.504.156.000,- | 34.146.205.015,- | 98,96 |
| BELANJA LANGSUNG | | 93.569.980.291,- | 75.925.097.602,- | 81,14 |
| 1. | Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan | 27.672.976.350,- | 21.503.454.899,- | 77,71 |
| 2. | Program Pengembangan Pembiayaan Kesehatan | 50.829.149.345,- | 42.928.019.475,- | 84,46 |
| 3. | Program Peningkatan Kualitas Penyediaan Pelayanan Kesehatan | 11.054.487.766,- | 7.783.742.632,- | 70,41 |
| 5. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 3.877.179.330,- | 3.574.283.096,- | 92,19 |
| 6. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 75.937.500,- | 75.347.500,- | 99,22 |
| 7. | Program | 60.250.000,- | 60.250.000,- | 100,00 |

| NO | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | REALISASI | |
|----|---|-------------------|-------------------|-------|
| | | | RP | % |
| | peningkatan kapasitas aparatur sipil Negara | | | |
| | TOTAL | 128.074.136.291,- | 110.071.302.617,- | 85,94 |

Berdasarkan tabel terlihat bahwa Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2020 sebesar Rp. 128.074.136.291,- dengan realisasi belanja seluruhnya sebesar Rp. 110.071.302.617,- (85.94 %) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 34.504.156.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.146.205.015,- (98.96%) dan belanja langsung sebesar Rp 93.569.980.291,-. dengan realisasi sebesar Rp. 75.925.097.602,- atau (81,14%). Realisasi kinerja secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 5 Rencana Program Kegiatan dan Realisasi Tahun 2020

| No | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target renstra PD pada tahun 2017 - 2022 (akhir periode renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun lalu (2019) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020) | | Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tahun 2020 | |
|----|---|--|---|---------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|--------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1. | Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan | Persentase peningkatan kategori keluarga sehat | 9 | 8.825.000.000 | 3,12 | 9.863.119.559 | 5 | 27.672.976.350 | 3,12 | 21.503.454.899 | 62,40 | 77,71 |
| | | Prevalensi stunting pada baduta | 12,04 | | 6,98 | | 12,04 | | 9,81 | - | 138,12 % | |
| 1. | Pelayanan Kesehatan ibu dan anak | Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil | 100 | 950.000.000 | 95,1 | 411.894.670 | 100,0 | 393.430.000 | 88,19 | 388.155.000 | 88,19 | 98,66 |
| | | Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin | 100 | | 97,3 | | 100,0 | | 94,21 | - | 94,21 | |
| | | Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100 | | 94,9 | | 100,0 | | 91,67 | - | 91,67 | |
| 2. | Penanggulangan masalah gizi masyarakat | Persentase rematri mendapat Tablet Tambah darah (TTD) | 36 | 440.000.000 | 62,2 | 175.891.000 | 35 | 141.195.000 | 15,40 | 27.510.000 | 44,00 | 19,48 |
| | | Persentase Ibu hamil KEK | 2,36 | | 3,53 | | 20 | | 3,15 | - | 182,50 | |
| 3. | Pelayanan Kesehatan anak usia sekolah | Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 100 | 450.000.000 | 69,9 | 254.460.000 | 100,0 | 3.661.500 | 87,59 | 3.661.500 | 87,59 | 100,00 |
| 4. | Pelayanan sunatan massal | Jumlah anak dari keluarga miskin yang dikhitan | 375 anak | 125.000.000 | 75,0 | 119.959.150 | 75,00 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---------|---------------|------|-----------------|-------|-------------|-------|-----------------|--------|--------|
| 5. | Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat | Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS | 75 | 1.000.000.000 | 50,9 | 712.822.900 | 65,00 | 801.400.000 | 52,45 | 773.797.000 | 80,69 | 96,56 |
| | | Cakupan strata RW Siaga Aktif purnama dan mandiri | 80% | | 31,7 | | 60,00 | | 57,69 | | 96,15 | |
| 6. | Peningkatan KIE dampak asap rokok | Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasyankes | 13% | 375.000.000 | 18,2 | 128.903.600 | 9,00 | 82.225.000 | 9,81 | 82.225.000 - | 109,00 | 100,00 |
| | | Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di perkantoran | 13% | | 7,85 | | 9,00 | | 7,41 | | 82,30 | |
| 7. | Peningkatan Promosi obat bahan alami asli Indonesia dan didalam dan diluar negeri | Jumlah RW percontohan baru yang mendapatkan pembinaan dan memanfaatkan TOGA | 75 RW | 30.000.000 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | |
| 8. | Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan | Persentase peserta Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) yang lulus dan mendapatkan sertifikat | 100% | 62.000.000 | 100 | 57.850.000 | 100 | 3.000.000 | 50,00 | 3.000.000 - | 50,00 | 100,00 |
| | | Persentase sarana IRTP yang diaudit | 100% | | 100 | | 100 | | 37,00 | | 37,00 | |
| 9. | Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya | Jumlah kantin/warung sekolah (PJAS) yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan | 48 unit | 53.000.000 | 23,0 | 48.314.000 - | 44 | 194.898.500 | - | 9.562.500 - | - | 4,91 |
| | | Jumlah sarana pelayanan | 48 unit | | 42,0 | | 44 | | 33,00 | | 75,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------|-------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|--------------------|--------|--------|
| | | kefarmasian yang mendapat pembinaan dan pengawasan | | | | | | | | | | |
| 10. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan masyarakat | Cakupan asuhan keperawatan keluarga yang dilayani sesuai standar | 85% | 200.000.000 | 82,2 | 69.977.000 - | 83 | 2.675.000 | 76,20 | 1.500.000 - | 91,80 | 56,07 |
| | | Cakupan kunjungan masyarakat ke fasyankes | 90% | | 36,9 | | 80 | | 55,48 | | 69,35 | |
| 11. | Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat | Persentase akses penduduk terhadap air minum berkualitas | 86% | 425.000.000 | 95,8 | 125.840.864 - | 84 | 229.238.000 | 97,76 | 214.163.070 - | 116,38 | 93,42 |
| | | Persentase akses penduduk terhadap jamban sehat | 72,5 % | | 79,9 | | 71,5 | | 80,00 | | 111,89 | |
| 12. | Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat | Persentase rumah sehat | 68 | 390.000.000 | 68,0 | 64.711.000 | 66,00 | 97.352.000 | 67,72 | 97.352.000 | 102,61 | 100,00 |
| 13. | Pelayanan pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular | Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB | 100% | 600.000.000 | 135,2 | 128.805.000 | 100 | 1.706.118.851 | 81,25 | 1.697.596.250 - | 81,25 | 99,50 |
| | | Cakupan Pelayanan kesehatan orang terduga TB | | | 64,6 | | 100 | | 48,55 | | 51,11 | |
| 14. | Pencegahan Penularan Penyakit Endemik & Epidemik | Angka Bebas Jentik (ABJ) | ≥95% | 375.000.000 | 89,1 | 126.022.300 | ≥95 | 278.860.350 | 88,73 | 238.496.600 | 93,40 | 85,53 |
| 15. | Penanggulangan HIV AIDS | Cakupan Pelayanan kesehatan orang | 100% | 575.000.000 | 69,1 | 170.225.000 | 100 | 783.843.799 | 79,45 | 468.652.783 | 79,45 | 59,79 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|------------|---------------|-------|-------------|------------|-------------|-------|-------------|--------|--------|
| | | dengan risiko terinfeksi HIV | | | | | | | | | | |
| 16. | Peningkatan Pelayanan Imunisasi | Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap | 93,00 % | 480.000.000 | 93,6 | 57.461.500 | 93 | 20.825.000 | 85,91 | 20.825.000 | 92,38 | 100,00 |
| 17. | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan | | | 1.185.000.000 | | 593.638.475 | | 455.695.220 | | 450.876.316 | | 98,94 |
| | | Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif | 100% | | 90,1 | | 100 | | 69,44 | 221.619.596 | 69,44 | 153,44 |
| | | Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi | 100% | | 72,9 | | 100 | | 37,82 | 10.450.000 | 37,82 | |
| | | Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus | 100% | | 98,4 | | 100 | | 100,8 | 16.145.000 | 100,81 | |
| 18. | Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat | Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat | 100% | 510.000.000 | 114,3 | 181.520.600 | 100 | 491.535.000 | 119,1 | 472.185.000 | 119,10 | 96,06 |
| 19. | Penyelenggaraan dan pembinaan kesehatan kerja dan Olah raga | Jumlah Pos UKK yang terbentuk | 15 pos | 250.000.000 | 11,0 | 115.228.000 | 10 | 31.112.500 | 13,00 | 31.112.500 | 130,00 | 100,00 |
| | | Persentase jemaah haji yang diperiksa kebugarannya | 90% | | 94,5 | - | 85 | | 89,51 | - | 105,31 | |
| 20. | Peningkatan kesehatan lansia | Persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 150.000.000 | 70,2 | 121.876.000 | 100 | 1.750.000 | 63,92 | 1.750.000 | 63,92 | 100,00 |
| 21. | Peningkatan Surveilans Epidemiologi | Penemuan Kasus AFP pada penduduk < 15 tahun | ≥ 2/100000 | 200.000.000 | 4,00 | 147.212.500 | ≥ 2/100000 | 49.945.000 | 1,00 | 46.225.000 | 150 | 92,55 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|------|----------------|------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--------|-------|
| | Penanggulangan Wabah | | | | | | | | | | | |
| 22. | Bantuan Operasional Kesehatan | Jumlah indikator SPM dengan cakupan > 80% | 12 | | 6,00 | 6.050.506.000 | 10,00 | 21.904.215.630 | 6,00 | 16.474.809.380 | 60 | 75,21 |
| 2. | Program Pengembangan Pembiayaan Kesehatan | Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional | 100% | 23.899.168.000 | 91,7 | 30.041.969.765 | 91,70 | 50.829.149.345 | 93,67 | 42.928.019.475 | 102,15 | 84,46 |
| 1. | Pembiayaan Kesehatan Kota Cimahi | | | 4.600.000.000 | | 13.264.697.772 | 95 | 30.703.459.398 | | 25.532.044.337 | - | |
| | | Persentase pembiayaan kesehatan bagi PBI JKN Kota Cimahi (60 % dari premi) | 100% | 4.600.000.000 | 85,3 | 8.524.270.740 | 100 | 22.762.711.298 | 100,0 | 19.156.372.390 | 100,00 | 84,16 |
| | | Persentase pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar kuota PBI (Jamkesda) | 100% | | 99,9 | 4.740.427.032 | 100 | 7.940.748.100 | 100,0 | 6.375.671.947 | 100,00 | |
| 2. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Utara | Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Utara | 100% | 1.926.648.000 | 16,8 | 1.866.904.126 | 100 | 2.323.843.557 | 72,45 | 1.754.056.976 | 72,45 | 75,48 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------|---------------|------|---------------|-----|---------------|-------|---------------|-------|-------|
| 3. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pasirkaliki | Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Pasirkaliki | 100% | 829.584.000 | 77,5 | 541.460.121 | 100 | 622.840.571 | 72,45 | 555.589.570 | 72,45 | 89,20 |
| 4. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Citeureup | Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Citeureup | 100% | 1.332.720.000 | 53,3 | 1.147.141.465 | 100 | 1.187.534.674 | 90,00 | 1.132.265.365 | 90,00 | 95,35 |
| 5. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cipageran | Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cipageran | 100% | 1.648.656.000 | 14,2 | 1.371.914.430 | 100 | 1.775.182.787 | 81,96 | 1.454.934.839 | 81,96 | 81,96 |
| 6. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Tengah | Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Tengah | 100% | 2.016.000.000 | 24,6 | 1.663.401.611 | 100 | 1.538.486.793 | 86,19 | 1.380.801.213 | 86,19 | 89,75 |
| 7. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di | Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Padasuka | 100% | 1.828.368.000 | 19,3 | 1.590.956.808 | 100 | 1.803.264.530 | 95,00 | 1.608.208.032 | 95,00 | 89,18 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|------|---------------|------|---------------|-----|---------------|-------|---------------|-------|-------|
| | Puskesmas Padasuka | | | | | | | | | | | |
| 8. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cigugur Tengah | Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cigugur Tengah | 100% | 1.784.304.000 | 29,2 | 1.234.755.457 | 100 | 1.640.206.894 | 82,00 | 1.311.760.316 | 82,00 | 79,98 |
| 9. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Selatan | Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Selatan | 100% | 1.653.048.000 | 42,1 | 1.381.396.080 | 100 | 1.415.064.947 | 85,00 | 1.256.756.461 | 85,00 | 88,81 |
| 10. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Melong Asih | Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Melong Asih | 100% | 1.530.000.000 | 32,0 | 1.343.854.116 | 100 | 1.488.927.267 | 95,00 | 1.356.324.103 | 95,00 | 91,09 |
| 11. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cibeureum | Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cibeureum | 100% | 1.745.496.000 | 25,7 | 1.593.794.430 | 100 | 2.064.377.722 | 90,00 | 1.753.811.161 | 90,00 | 84,96 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|------|---------------|------|-------------|-----|---------------|-------|---------------|--------|-------|
| 12. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cibeber | Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cibeber | 100% | 991.008.000 | 43,8 | 771.393.198 | 100 | 946.027.412 | 70,89 | 767.209.645 | 70,89 | 81,10 |
| 13. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Leuwigajah | Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Leuwigajah | 100% | 1.093.104.000 | 80,9 | 952.174.515 | 100 | 1.166.780.213 | 85,00 | 950.846.070 | 85,00 | 81,49 |
| 14. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Melong Tengah | Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Melong Tengah | 100% | 920.232.000 | 33,2 | 762.415.180 | 100 | 831.339.580 | 100,0 | 796.899.893 | 100,00 | 95,86 |
| 15. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di puskesmas dan jaringannya | Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas | 100 | - | 14,2 | 141.495.822 | | - | - | - | - | - |
| 16. | Jaminan Persalinan | Persentase pembiayaan persalinan bersumber dana Jampersal (di luar peserta JKN) | 100% | - | 87,3 | 414.214.634 | 100 | 1.321.813.000 | 100,0 | 1.316.511.494 | 100,00 | 99,60 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|--------|--------|
| 3. | Program Peningkatan Kualitas Penyediaan Pelayanan Kesehatan | Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Madya | 92,31 | 5.870.000.000 | 92,31 | 6.976.226.227 | 84,62 | 11.054.487.766 | 92,31 | 7.783.742.632 | 109,09 | 70,41 |
| 1. | Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan | Jumlah Puskesmas dengan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) yang meningkat stratanya | 13 PKM | 500.000.000 | 2,00 | 346.563.651 | 3,00 | 80.700.000 | 2,00 | 80.181.191 | 66,67 | 99,36 |
| 2. | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan | Persentase nakes yang terlatih | 100% | 285.000.000 | 83,3 | 197.141.800 | 100% | 8.987.500 | - | 8.987.500 | - | 100,00 |
| 3. | Akreditasi Puskesmas | Jumlah puskesmas yang ter-Akreditasi | 13 PKM | 860.000.000 | 3,00 | 1.127.523.445 | 0 | 921.850.002 | - | 550.313.550 | - | 59,70 |
| | | Jumlah Puskesmas re-akreditasi | 13 PKM | | 3,00 | | - | | 4 | | - | |
| 4. | Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan | Persentase obat pelayanan kesehatan dasar (sesuai Fornas) yang telah diajukan oleh puskesmas | 100 | 2.200.000.000 | 87,5 | 2.890.661.431 | 100 | 3.107.375.328 | 100,0 | 3.077.093.195 | 100,00 | 99,03 |
| | | Persentase reagen dan bahan habis pakai yang diajukan oleh puskesmas | 100% | | 100 | | 100 | | 90,00 | | 90,00 | |
| 5. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas | Jumlah puskesmas atau pustu yang mendapatkan pengadaan perbaikan prasarana (Puskemas Rawat inap) | 14 pkm dan pustu, 1 pkm rawat | 852.000.000 | 1,00 | 1.353.714.900 | 4 | 6.007.832.675 | 3,00 | 3.270.669.690 | 75,00 | 54,44 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------------------------------|---------------|-------|---------------|---------|---------------|-------|---------------|---------|-------|
| | | | inap | | | | | | | | | |
| | | Jumlah pengadaan sarana kendaraan operasional (ambulans dan motor) di puskesmas | 11 kendaraan (3 ambulans + 8 motor) | | - | - | 4 motor | | - | | - | |
| 6. | Pengadaan alat kesehatan dan pelayanan kefarmasian | Persentase pemenuhan kebutuhan alat kesehatan | 100% | 775.000.000 | 100 | 968.648.000 | 100 | 854.178.261 | 100 | 732.483.506 | 100,00 | 85,75 |
| 7. | Pengembangan dan pemutakhiran Data dasar Standar Pelayanan Kesehatan | Persentase puskesmas yang melaporkan data kesehatan secara lengkap dan tepat waktu | 100% | 398.000.000 | 84,6 | 91.973.000 | 90 | 73.564.000 | 84,71 | 73.001.500 | 99,24 % | 99,24 |
| 4. | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara | 100% | 4.162.000.000 | 96,43 | 3.280.773.444 | 100 | 3.877.179.330 | 100,0 | 3.574.283.096 | 100,00 | 92,19 |
| | | Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi | 100% | | 100 | | 100 | | 100,0 | | 100,00 | |
| 1. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah bulan penyediaan ATK | 12 bulan | 103.500.000 | 11,0 | 70.760.000 | 12,00 | 164.119.500 | 12,00 | 159.346.457 | 100,00 | 97,09 |
| 2. | Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air | Jumlah bulan jasa komunikasi | 12 bulan | 750.000.000 | 12,0 | 386.406.725 | 12,00 | 436.641.350 | 12,00 | 375.673.235 | 100,00 | 86,04 |
| | | Jumlah bulan jasa | 12 | | 12,0 | | 12,00 | | 12,00 | - | 100,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----------|---------------|------|---------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|--------|
| | | listrik | bulan | | | | | | | | | |
| | | Jumlah bulan jasa air | 12 bulan | | 12,0 | | 12,00 | | 12,00 | - | 100,00 | |
| 3. | Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan | | 12 bulan | 150.000.000 | 12,0 | 75.365.725 | 12,00 | 164.912.500 | 12,00 | 153.280.450 | 100,00 | 92,95 |
| | | Jumlah bulan penggandaan | 12 bulan | | 12,0 | | 12,00 | | 12,00 | - | 100,00 | |
| 4. | Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas | Jumlah pengadaan kendaraan | 2 unit | 1.150.000.000 | - | 1.093.903.150 | 4 | | - | - | - | - |
| | | Jumlah kendaraan yang dipelihara | 116 Unit | | 108 | | 27 | 874.999.999 | 27,00 | 723.098.890 | 100,00 | 82,64 |
| | | Jumlah kendaraan asuransi yang dibayar | 68 Unit | | 108 | | 27 | | 27,00 | - | 100,00 | |
| 5. | Pengadaan dan pemeliharaan meubelair kantor | Jumlah meja | 94 Unit | 115.000.000 | 1,00 | 1.034.000 | 8 | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah kursi | 100 Unit | | - | | 8 | | - | | - | |
| | | Jumlah lemari | 26 Unit | | 2,00 | | 4 | | | | - | |
| | | Jumlah set partisi | 1 Set | | - | | 0 | | - | | - | |
| 6. | Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor | Jumlah unit komputer | 58 Unit | 200.000.000 | 4,00 | 205.739.780 | 5 | 392.761.000 | 14,00 | 385.451.600 | 280,00 | 98,14 |
| | | Jumlah unit printer | 55 Unit | | 1,00 | | 3 | | 5,00 | - | 166,67 | |
| | | Jumlah unit server | 3 Unit | | - | | 1 | | - | - | - | |
| | | Jumlah unit ac | 18 Unit | | 3,00 | | 2 | | 2,00 | | 100,00 | |
| 7. | Penyediaan peralatan | Jumlah set peralatan rumah tangga | 3 Set | 8.500.000 | 3,00 | 4.927.000 | 3 | 4.650.000 | 1,00 | 4.650.000 | 33,33 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|-----------|-------------|-------|-------------|---------|-------------|-------|-------------|--------|--------|
| | rumah tangga | | | | | | | | | | | |
| 8. | Penataan arsip daerah | Jumlah arsip aktif dan inaktif | 8 Dokumen | 25.000.000 | 2,00 | 51.300.000 | 2 | - | - | - | - | - |
| 9. | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan | Jumlah bulan THL yang diasuransikan | 12 bulan | 70.000.000 | 12 | 52.051.272 | 12 | 98.880.000 | 12,00 | 69.228.128 | 100,00 | 70,01 |
| 10. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman | 12 bulan | 70.000.000 | 12 | 59.886.700 | 12 | 192.005.000 | 12,00 | 305.690.500 | 100,00 | 159,21 |
| 11. | Koordinasi dan konsultasi kedinasan | Jumlah perjalanan dinas | 725 Kali | 415.000.000 | 599 | 479.749.092 | 725 | 130.235.763 | 335 | 122.904.891 | 46,21 | 94,37 |
| | | Jumlah perjalanan caraka | 80 Kali | | 5,00 | | 80 | | - | - | - | |
| 12. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah bulan jasa kebersihan kantor | 12 bulan | 390.000.000 | 12 | 369.856.000 | 12 | 653.500.000 | 12,00 | 617.390.000 | 100,00 | 94,47 |
| 13. | Pemeliharaan rumah dan gedung dinas | Jumlah bulan pemeliharaan | 12 bulan | 490.000.000 | 12,0 | 429.794.000 | 12 | 764.474.218 | 12,00 | 662.218.945 | 100,00 | 86,62 |
| 5. | Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Nilai LAKIP | 85 (A) | 501.000.000 | 78,1 | 153.865.000 | 79 (BB) | 75.937.500 | 78,05 | 75.347.500 | 104,07 | 99,22 |
| | | Persentase capaian penyerapan anggaran | 85% | | 79,56 | | 85 | | 85,85 | - | 101,00 | |
| 1. | Penyusunan Laporan Inventaris | Jumlah dokumen Laporan Inventaris Barang | 1 dokumen | 55.000.000 | 1 | 9.700.000 | 1 | 4.750.000 | 1,00 | 4.200.000 | 100,00 | 88,42 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|-----------|-------------|-----|----------------|-----|----------------|-------|----------------|--------|--------|
| | Barang | | | | | | | | | | | |
| 2. | Penyusunan Laporan Keuangan | Jumlah dokumen Laporan Keuangan | 1 dokumen | 66.000.000 | 1 | 27.117.000 | 1 | 11.550.000 | 1,00 | 11.510.000 | 100,00 | 99,65 |
| 3. | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | | | 110.000.000 | | 32.093.000 | | 39.647.000 | | 39.647.000 | | 100,00 |
| | | Jumlah dokumen RENSTRA | 1 dokumen | | - | | 1 | | - | | | |
| | | Jumlah dokumen RENJA | 2 dokumen | | 2 | | 2 | | 2,00 | | | |
| 4. | Penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, LKIP dan LPPD PD | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi | 4 dokumen | 190.000.000 | 4 | 34.036.000 | 4 | 19.990.500 | 4,00 | 19.990.500 | 100,00 | 100,00 |
| | | Jumlah dokumen LPPD | 1 dokumen | | 1 | | 1 | | 1,00 | - | 100,00 | |
| | | Jumlah dokumen LKIP | 1 dokumen | | 1 | | 1 | | 1,00 | - | 100,00 | |
| 6. | Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara | Persentase ASN yang dibina | 100% | 200.000.000 | 100 | 87.500.000 | 100 | 60.250.000 | 36,74 | 60.250.000 | 36,74 | 100,00 |
| 1. | Pengembangan kapasitas sumberdaya pegawai | Jumlah ASN yang dibina | 100% | 200.000.000 | 100 | 87.500.000 | 100 | 60.250.000 | 45,71 | 60.250.000 | 45,71 | 100,00 |
| | | Jumlah ASN yang terlatih | 100% | | 100 | | 100 | | 27,78 | - | 27,78 | |
| JUMLAH ANGGARAN TOTAL DINKES | | | | | | 50.403.453.995 | | 93.569.980.291 | 59,96 | 75.925.097.602 | | |

Tabel 2. 6 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

| No | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target renstra PD pada tahun 2017 - 2022 (akhir periode renstra PD) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program dan Kegiatan Tahun 2022 | Target Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2022 | |
|----|---|--|---|--|--|---|--|--|--|
| | | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020) | Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2020) | Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tahun n-1 (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1. | Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan | Persentase peningkatan kategori keluarga sehat | 9 | 5 | 3,12 | 62,40 | | | 100,00 |
| | | Prevalensi stunting pada baduta < | 12,04 | 12,04 | 9,81 | 138,12% | | | 100,00 |
| 1. | Pelayanan Kesehatan ibu dan anak | Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil | 100 | 100,00 | 88,19 | 88,19 | | | 100,00 |
| | | Cakupan Pelayanan | 100 | 100,00 | 94,21 | 94,21 | | | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|----------|--------|-------|--------|--|--|--------|
| | | kesehatan ibu bersalin | | | | | | | |
| | | Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100 | 100,00 | 91,67 | 91,67 | | | 100,00 |
| 2. | Penanggulangan masalah gizi masyarakat | Persentase rematri mendapat Tablet Tambah darah (TTD) | 36 | 35 | 15,40 | 44,00 | | | 100,00 |
| | | Persentase Ibu hamil KEK | 2,36 | 20 | 3,15 | 182,50 | | | 100,00 |
| 3. | Pelayanan Kesehatan anak usia sekolah | Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 100 | 100,00 | 87,59 | 87,59 | | | 100,00 |
| 4. | Pelayanan sunatan massal | Jumlah anak dari keluarga miskin yang dikhitan | 375 anak | 75,00 | - | - | | | 100,00 |
| 5. | Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat | Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS | 75% | 65,00 | 52,45 | 80,69 | | | 100,00 |
| | | Cakupan strata RW Siaga Aktif purnama dan | 80% | 60,00 | 57,69 | 96,15 | | | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------|-------|-------|--------|--|--|--------|
| | | mandiri | | | | | | | |
| 6. | Peningkatan KIE dampak asap rokok | Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasyankes | 13% | 9,00 | 9,81 | 109,00 | | | 100,00 |
| | | Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di perkantoran | 13% | 9,00 | 7,41 | 82,30 | | | 100,00 |
| 7. | Peningkatan Promosi obat bahan alami asli Indonesia didalam dan diluar negeri | Jumlah RW percontohan baru yang mendapatkan pembinaan dan memanfaatkan TOGA | 75 RW | 15,00 | - | - | | | 100,00 |
| 8. | Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan | Persentase peserta Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) yang lulus dan mendapatkan sertifikat | 100% | 100 | 50,00 | 50,00 | | | 100,00 |
| | | Persentase sarana IRTP yang diaudit | 100% | 100 | 37,00 | 37,00 | | | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---------|----|-------|--------|--|--|--------|
| 9. | Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya | Jumlah kantin/warung sekolah (PJAS) yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan | 48 unit | 44 | - | - | | | 100,00 |
| | | Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang mendapat pembinaan dan pengawasan | 48 unit | 44 | 33,00 | 75,00 | | | 100,00 |
| 10. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan masyarakat | Cakupan asuhan keperawatan keluarga yang dilayani sesuai standar | 85% | 83 | 76,20 | 91,80 | | | 100,00 |
| | | Cakupan kunjungan masyarakat ke fasyankes | 90% | 80 | 55,48 | 69,35 | | | 100,00 |
| 11. | Pengkajian Pengembangan | Persentase akses penduduk terhadap | 86% | 84 | 97,76 | 116,38 | | | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------|-------|-------|--------|--|--|--------|
| | lingkungan sehat | air minum berkualitas | | | | | | | |
| | | Persentase akses penduduk terhadap jamban sehat | 72,5 % | 71,5 | 80,00 | 111,89 | | | 100,00 |
| 12. | Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat | Persentase rumah sehat | 68 | 66,00 | 67,72 | 102,61 | | | 100,00 |
| 13. | Pelayanan pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular | Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB | 100% | 100 | 81,25 | 81,25 | | | 100,00 |
| | | Cakupan Pelayanan kesehatan orang terduga TB | | 100 | 48,55 | 51,11 | | | 100,00 |
| 14. | Pencegahan Penularan Penyakit Endemik & Epidemik | Angka Bebas Jentik (ABJ) | ≥95% | ≥95 | 88,73 | 93,40 | | | 100,00 |
| 15. | Penanggulangan HIV AIDS | Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | 100% | 100 | 79,45 | 79,45 | | | 100,00 |
| 16. | Peningkatan Pelayanan Imunisasi | Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap | 93,00% | 93 | 85,91 | 92,38 | | | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------|-----|--------|--------|--|--|--------|
| 17. | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan | Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif | 100% | 100 | 69,44 | 69,44 | | | 100,00 |
| | | Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi | 100% | 100 | 37,82 | 37,82 | | | 100,00 |
| | | Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus | 100% | 100 | 100,81 | 100,81 | | | 100,00 |
| 18. | Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat | Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat | 100% | 100 | 119,10 | 119,10 | | | 100,00 |
| 19. | Penyelenggaraan dan pembinaan kesehatan kerja dan Olah raga | Jumlah Pos UKK yang terbentuk | 15 pos | 10 | 13,00 | 130,00 | | | 100,00 |
| | | Persentase jemaah haji yang diperiksa kebugarannya | 90% | 85 | 89,51 | 105,31 | | | 100,00 |
| 20. | Peningkatan kesehatan lansia | Persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan | 100% | 100 | 63,92 | 63,92 | | | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|------------|------------|-------|--------|--|--|--------|
| | | skrining kesehatan sesuai standar | | | | | | | |
| 21. | Peningkatan Surveilans Epidemiologi penanggulangan Wabah | Penemuan Kasus AFP pada penduduk < 15 tahun | ≥ 2/100000 | ≥ 2/100000 | 1,00 | 150 | | | 100,00 |
| 22. | Bantuan Operasional Kesehatan | Jumlah indikator SPM dengan cakupan > 80% | 12 | 10,00 | 6,00 | 60 | | | 100,00 |
| 2. | Program Pengembangan Pembiayaan Kesehatan | Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional | 100% | 91,70 | 93,67 | 102,15 | | | |
| 1. | Pembiayaan Kesehatan Kota Cimahi | Persentase pembiayaan kesehatan bagi PBI JKN Kota Cimahi (60 % dari premi) | 100% | 100 | | | | | 100,00 |
| | | Persentase pembiayaan pelayanan | 100% | 100 | | | | | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|------|-----|-------|-------|--|--------|
| | | kesehatan bagi masyarakat miskin di luar kuota PBI (Jamkesda) | | | | | | |
| 2. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Utara | Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Utara | 100% | 100 | 72,45 | 72,45 | | 100,00 |
| 3. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pasirkaliki | Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Pasirkaliki | 100% | 100 | 72,45 | 72,45 | | 100,00 |
| 4. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Citeureup | Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di | 100% | 100 | 90,00 | 90,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|------|-----|-------|-------|--|--|--------|
| | | puskesmas Citeureup | | | | | | | |
| 5. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cipageran | Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cipageran | 100% | 100 | 81,96 | 81,96 | | | 100,00 |
| 6. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Tengah | Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Tengah | 100% | 100 | 86,19 | 86,19 | | | 100,00 |
| 7. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Padasuka | Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Padasuka | 100% | 100 | 95,00 | 95,00 | | | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|------|-----|-------|-------|--|--|--------|
| 8. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cigugur Tengah | Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cigugur Tengah | 100% | 100 | 82,00 | 82,00 | | | 100,00 |
| 9. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Selatan | Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Selatan | 100% | 100 | 85,00 | 85,00 | | | 100,00 |
| 10. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Melong Asih | Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Melong Asih | 100% | 100 | 95,00 | 95,00 | | | 100,00 |
| 11. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cibeureum | Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di | 100% | 100 | 90,00 | 90,00 | | | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|------|-----|--------|--------|--|--|--------|
| | | puskesmas Cibeureum | | | | | | | |
| 12. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cibeber | Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cibeber | 100% | 100 | 70,89 | 70,89 | | | 100,00 |
| 13. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Leuwigajah | Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Leuwigajah | 100% | 100 | 85,00 | 85,00 | | | 100,00 |
| 14. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Melong Tengah | Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Melong Tengah | 100% | 100 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------|-------|-------|--------|--|--|--------|
| 15. | Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di puskesmas dan jaringannya | Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas | 100 | | - | - | | | 100,00 |
| 16. | Jaminan Persalinan | Persentase pembiayaan persalinan bersumber dana Jampersal (di luar peserta JKN) | 100% | 100 | | | | | 100,00 |
| 3. | Program Peningkatan Kualitas Penyediaan Pelayanan Kesehatan | Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Madya | 92,31 | 84,62 | 92,31 | 109,09 | | | |
| 1. | Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan | Jumlah Puskesmas dengan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) yang meningkat stratanya | 13 PKM | 3,00 | 2,00 | 66,67 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|------------------------------------|------|--------|--------|--|--|--|
| | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan | Persentase nakes yang terlatih | 100% | 100% | - | - | | | |
| 2. | Akreditasi Puskesmas | Jumlah puskesmas yang ter-Akreditasi | 13 PKM | 0 | - | - | | | |
| | | Jumlah Puskesmas re-akreditasi | 13 PKM | 4 | - | - | | | |
| 3. | Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan | Persentase obat pelayanan kesehatan dasar (sesuai Fornas) yang telah diajukan oleh puskesmas | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | | Persentase reagen dan bahan habis pakai yang diajukan oleh puskesmas | 100% | 100 | 90,00 | 90,00 | | | |
| 4. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas | Jumlah puskesmas atau pustu yang mendapatkan pengadaan perbaikan prasarana | 14 pkm dan pustu, 1 pkm rawat inap | 4 | 3,00 | 75,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------------------------------|---------|--------|--------|--|--|--|
| | | (Puskemas Rawat inap) | | | | | | | |
| | | Jumlah pengadaan sarana kendaraan operasional (ambulans dan motor) di puskesmas | 11 kendaraan (3 ambulans + 8 motor) | 4 motor | - | | | | |
| 5. | Pengadaan alat kesehatan dan pelayanan kefarmasian | Persentase pemenuhan kebutuhan alat kesehatan | 100% | 100 | 100,00 | 100,00 | | | |
| 6. | Pengembangan dan pemutakhiran Data dasar Standar Pelayanan Kesehatan | Persentase puskesmas yang melaporkan data kesehatan secara lengkap dan tepat waktu | 100% | 90 | 84,71 | | | | |
| 4. | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara | 100% | 100 | 100,00 | 100,00 | | | |

| | | Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi | 100% | 100 | 100,00 | 100,00 | | | |
|----|--|--|----------|-------|--------|--------|--|--|--|
| 1. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah bulan penyediaan ATK | 12 bulan | 12,00 | 12,00 | 100,00 | | | |
| 2. | Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air | Jumlah bulan jasa komunikasi | 12 bulan | 12,00 | 12,00 | 100,00 | | | |
| | | Jumlah bulan jasa listrik | 12 bulan | 12,00 | 12,00 | 100,00 | | | |
| | | Jumlah bulan jasa air | 12 bulan | 12,00 | 12,00 | 100,00 | | | |
| 3. | Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan | Jumlah bulan penggandaan | 12 bulan | 12,00 | 12,00 | 100,00 | | | |
| 4. | Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas | Jumlah pengadaan kendaraan | 2 unit | 4 | - | - | | | |
| | | Jumlah kendaraan yang dipelihara | 116 Unit | 27 | 27,00 | 100,00 | | | |
| | | Jumlah kendaraan asuransi yang dibayar | 68 Unit | 27 | 27,00 | 100,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|-----------|----|-------|--------|--|--|
| 5. | Pengadaan dan pemeliharaan meubelair kantor | Jumlah meja | 94 Unit | 8 | - | - | | |
| | | Jumlah kursi | 100 Unit | 8 | - | - | | |
| | | Jumlah lemari | 26 Unit | 4 | | - | | |
| | | Jumlah set partisi | 1 Set | 0 | - | - | | |
| 6. | Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor | Jumlah unit komputer | 58 Unit | 5 | 14,00 | 280,00 | | |
| | | Jumlah unit printer | 55 Unit | 3 | 5,00 | 166,67 | | |
| | | Jumlah unit server | 3 Unit | 1 | - | - | | |
| | | Jumlah unit ac | 18 Unit | 2 | 2,00 | 100,00 | | |
| 7. | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah set peralatan rumah tangga | 3 Set | 3 | 1,00 | 33,33 | | |
| 8. | Penataan arsip daerah | Jumlah arsip aktif dan inaktif | 8 Dokumen | 2 | - | - | | |
| 9. | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan | Jumlah bulan THL yang diasuransikan | 12 bulan | 12 | 12,00 | 100,00 | | |
| 10. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah bulan penyediaan makanan dan | 12 bulan | 12 | 12,00 | 100,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-----------|---------|-------|--------|--|--|--|
| | | minuman | | | | | | | |
| 11. | Koordinasi dan konsultasi kedinasan | Jumlah perjalanan dinas | 725 Kali | 725 | 335 | 46,21 | | | |
| | | Jumlah perjalanan caraka | 80 Kali | 80 | - | - | | | |
| 12. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah bulan jasa kebersihan kantor | 12 bulan | 12 | 12,00 | 100,00 | | | |
| 13. | Pemeliharaan rumah dan gedung dinas | Jumlah bulan pemeliharaan | 12 bulan | 12 | 12,00 | 100,00 | | | |
| 5. | Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Nilai LAKIP | 85 (A) | 79 (BB) | 78,05 | 104,07 | | | |
| | | Persentase capaian penyerapan anggaran | 85% | 85 | 85,85 | 101,00 | | | |
| 1. | Penyusunan Laporan Inventaris Barang | Jumlah dokumen Laporan Inventaris Barang | 1 dokumen | 1 | 1,00 | 100,00 | | | |
| 2. | Penyusunan Laporan Keuangan | Jumlah dokumen Laporan Keuangan | 1 dokumen | 1 | 1,00 | 100,00 | | | |
| 3. | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen RENSTRA | 1 dokumen | 1 | - | - | | | |
| | | Jumlah dokumen RENJA | 2 dokumen | 2 | 2,00 | 100,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------|-----|-------|--------|--|--|--|
| 4. | Penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, LKIP dan LPPD PD | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi | 4 dokumen | 4 | 4,00 | 100,00 | | | |
| | | Jumlah dokumen LPPD | 1 dokumen | 1 | 1,00 | 100,00 | | | |
| | | Jumlah dokumen LKIP | 1 dokumen | 1 | 1,00 | 100,00 | | | |
| 6. | Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara | Persentase ASN yang dibina | 100% | 100 | 36,74 | 36,74 | | | |
| 1. | Pengembangan kapasitas sumberdaya pegawai | Jumlah ASN yang dibina | 100% | 100 | 45,71 | 45,71 | | | |
| | | Jumlah ASN yang terlatih | 100% | 100 | 27,78 | 27,78 | | | |

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran pencapaian sasaran pembangunan kesehatan diukur dengan menggunakan indikator-indikator pembangunan kesehatan mulai dari Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan (IKU) hingga indikator tujuan Indeks Kesehatan. Pengukuran target kinerja dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Adapun hasil pencapaian untuk indikator Indeks Kesehatan tahun 2020 adalah sebesar 82,91 melebihi dari yang ditargetkan sebesar 82,51. Sementara itu untuk pengukuran kinerja dari sasaran strategi akan diukur berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan yang terdiri dari Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Indeks Keluarga Sehat. Berikut tabel hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan di tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Indikator Kinerja Utama tahun 2020

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2020 | % REALISASI | % CAPAIAN | KETERANGAN |
|----|---|---------------------------|----------------|-------------|-----------|---------------------------|
| 1 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka Kematian Ibu (AKI) | 101/100.000 KH | 115,6 | 85,54 | Tidak Tercapai |
| | | Angka Kematian Bayi (AKB) | 7 / 1000 KH | 6,6 | 105,71 | Tercapai, Melebihi Target |
| | | Indeks Keluarga Sehat | 0,41 % | 0,22 | 53,65 | Tidak Tercapai |

Angka Kematian Ibu di Kota Cimahi pada tahun 2020 sebesar 115,82/100.000 KH (12 kasus), menurun sebanyak 1 kasus dibandingkan tahun 2019 yaitu 13 Kasus 120,26/100.000 KH. Angka Kematian Bayi pada tahun 2020 sebesar 6,66/1000 KH meningkat menjadi 5,83/1000 KH (69 kasus), meningkat sebanyak 5 kasus dibanding tahun 2019 yaitu 64 kasus. Kemudian untuk hasil capaian indikator ketiga dalam IKU Dinas Kesehatan adalah Indeks Keluarga Sehat dengan hasil capaian tahun 2020 sebesar 0.22, masih dibawah target 0,41.

Hasil capaian Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi di tahun 2020 menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi antara $91\% \leq 100\%$ untuk indikator kinerja AKB, capaian kinerja tinggi antara $76\% \leq 90\%$ untuk AKI, dan capaian kinerja rendah antara $66\% \leq 75\%$ untuk indikator Indeks Keluarga Sehat. Dari 3 (tiga) indikator Kinerja pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis sudah memenuhi target yaitu AKB dengan 6,66/1000 KH dari 7/1000 KH. Sementara target 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Strategis belum mencapai target yaitu AKI dengan capaian 115,81/100.000 KH dari target 101/100.000 KH dan Indeks keluarga Sehat (IKS) 0,22 dari target 0,41. Capaian indikator kinerja AKI tahun 2020 sebesar 85,33% mengalami peningkatan kinerja sebesar 3,81% dibandingkan capaian tahun 2019 yaitu 81,52%. Capaian indikator kinerja AKB tahun 2020 adalah 104,86% mengalami penurunan sebesar 13,03% dibandingkan capaian tahun 2019 yaitu 117,89%. Sedangkan capaian indikator indeks keluarga sehat tahun 2020 adalah 53,66% mengalami penurunan sebesar 15,09% dibandingkan capaian tahun 2019 yaitu 68,75%.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2019, menjadi kinerja Dinas Kesehatan. Berikut ini capaian kinerja SPM bidang kesehatan tahun 2018-2020:

Tabel 2. 8 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2018-2020

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | TARGET (%) | CAPAIAN 2018 | CAPAIAN 2019 | CAPAIAN 2020 |
|----|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Pelayanan kesehatan ibu hamil | 100 | 94,66 | 95,09 | 88,19 |
| 2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | 100 | 96,24 | 97,31 | 94,21 |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100 | 94,42 | 94,95 | 91,67 |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | 100 | 48,39 | 53,93 | 60,24 |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 100 | 100,00 | 69,94 | 87,59 |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 100 | 90,27 | 90,08 | 69,44 |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada | 100 | 58,78 | 70,26 | 63,92 |

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | TARGET (%) | CAPAIAN 2018 | CAPAIAN 2019 | CAPAIAN 2020 |
|----|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| | usia lanjut | | | | |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | 100 | 65,65 | 72,96 | 37,82 |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus | 100 | 96,80 | 98,36 | 100,81 |
| 10 | Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | 100 | 79,88 | 114,32 | 119,1 |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga TB | 100 | 49,71 | 74,06 | 48,55 |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) | 100 | 60,98 | 69,02 | 79,45 |

C. ISU STRATEGIS

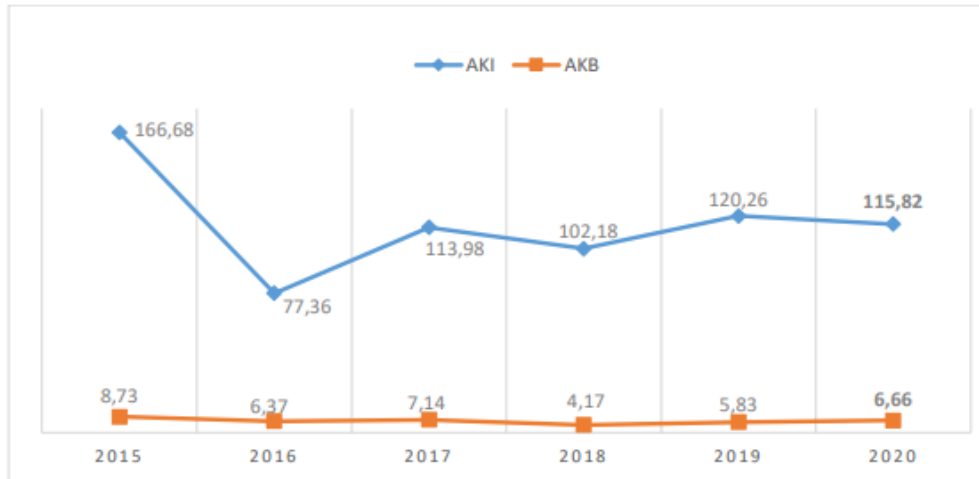
Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan tidak terlepas dari berbagai isu penting baik di tingkat nasional maupun regional (provinsi) terutama berkaitan dengan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkaitan dengan bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan menjalankan 5 (lima) program strategis yaitu : peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat; peningkatan pengendalian penyakit; pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS); dan peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Berikut uraian mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan program di Dinas Kesehatan.

1. Masih Adanya Kematian Ibu dan Bayi

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator derajat kesehatan. Tren Angka Kematian Ibu maupun Angka Kematian Bayi selama beberapa tahun terakhir masih fluktuatif.



Gambar 2. 1 Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Kota Cimahi Tahun 2015-2020

Angka Kematian Ibu di Kota Cimahi pada tahun 2020 sebesar 115,82/100.000 KH (12 kasus), menurun sebanyak 1 kasus dibandingkan tahun 2019 yaitu 13 Kasus 120,26/100.000 KH. Angka Kematian Bayi pada tahun 2020 sebesar 6,66/1000 KH meningkat menjadi 5,83/1000 KH (69 kasus), meningkat sebanyak 5 kasus dibanding tahun 2019 yaitu 64 kasus. Penyebab Kematian Ibu terbesar adalah penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah, perdarahan, infeksi dan hipertensi, Sedangkan penyebab kematian terbesar adalah asfiksia dan BBLR. AKI dan AKB yang masih fluktuatif dan menjadi permasalahan kesehatan di Kota Cimahi perlu mendapat perhatian khusus dan harus diselesaikan agar target RPJMD pada akhir periode dapat tercapai.

AKI dan AKB perlu mendapat perhatian khusus dan harus diselesaikan agar target RPJMD pada akhir periode dapat tercapai, karena berdasarkan target RPJMD untuk AKI adalah 115,2/100.000 KH dan AKB 6,4/1000 KH.

2. Belum Tercapainya Target SPM Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintahan yang di atur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Standar Teknis Pemenuhan SPM diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdapat 12 (dua belas) jenis layanan dasar.

Capaian SPM masing-masing setiap indikator jenis layanan terdapat pada tabel 8, dapat dilihat bahwa 10 dari 12 indikator belum mencapai target 100% yaitu indikator Pelayanan kesehatan ibu hamil 88,19%, Pelayanan kesehatan ibu bersalin 94,21%, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 91,67%, Pelayanan kesehatan balita 60,24%, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 87,59%, Pelayanan kesehatan pada usia produktif 69,44%, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 63,92%, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 37,82%, Pelayanan kesehatan orang terduga TB 48,55%, Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) 79,45%.

SPM Bidang Kesehatan perlu mendapat perhatian khusus. Pencapaian target-target SPM menjadi indikator penilaian kinerja Kepala Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada Warga Negara. Karena itu perlu upaya yang lebih optimal dan terkoordinasi agar pencapaian tersebut sesuai target.

3. Stunting Pada Balita

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Akibatnya anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Kondisi ini pada umumnya disebabkan oleh asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Penyebab dari stunting adalah rendahnya asupan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, yakni sejak janin hingga bayi umur dua tahun. Selain itu, buruknya fasilitas sanitasi, minimnya akses air bersih, dan kurangnya kebersihan lingkungan juga menjadi penyebab stunting. Kondisi kebersihan yang kurang terjaga membuat tubuh harus secara ekstra melawan sumber penyakit sehingga menghambat penyerapan gizi. Angka stunting pada balita di Kota Cimahi tahun 2020 sebesar

10,89% meningkat sebesar 1,83% dibandingkan tahun 2019 yaitu 9,06%. Angka ini masih dibawah prevalensi nasional berdasarkan Riskesdas tahun 2018 sebesar 31,1%. Walaupun demikian stunting tetap menjadi perhatian, karena Stunting yang telah terjadi bila tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan menurunnya pertumbuhan, lemahnya kognitif dan psikomotorik terhambat, lebih mudah terkena penyakit degeneratif, dan menurunkan kualitas sumber daya manusia.

4. Meningkatnya Kasus Penyakit Menular Dan Tidak Menular.

Upaya pengendalian penyakit menular difokuskan pada penurunan prevalensi kasus penyakit HIV-AIDS, Tuberkulosis dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Jumlah kasus Tuberkulosis dengan BTA terkonfirmasi positif mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2019 482 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 mencapai 587 kasus. Kasus DBD mengalami penurunan, pada tahun 2019 sebanyak 1020 kasus, sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 433 kasus.

Sementara itu untuk penyakit tidak menular, prevalensi Hipertensi dan Diabetes Melitus (DM) memiliki kecenderungan mengalami peningkatan, begitu pula dengan permasalahan kesehatan jiwa. Jumlah kasus DM meningkat, pada tahun 2019 terdapat 7604 kasus, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 10.640 kasus. Sedangkan untuk kasus Hipertensi mengalami penurunan yaitu pada tahun 2019 terdapat 20.600 kasus, sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 16.306 kasus. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko meningkatnya penyakit tidak menular (PTM). Keadaan ini perlu segera ditindaklanjuti mengingat dampak yang ditimbulkannya serta dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

5. Pandemi COVID-19

Kondisi Pandemi COVID-19 sejak Maret 2020, menyebabkan perubahan diberbagai aspek kehidupan, terutama sangat berpengaruh pada aspek kesehatan masyarakat. Sehingga,

pelaksanaan program-program bidang kesehatan terfokus pada penanganan COVID-19. Pada tahun 2020 Jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kota Cimahi sebanyak 2095 kasus, pasien sembuh 1428 kasus, Orang Tanpa Gejala 12.169 kasus, jumlah kematian 57 kasus.

Penanganan pandemi COVID-19 membutuhkan kemitraan berbagai pihak dan kesiapan sumber daya manusia pendukung. Peran tenaga kesehatan sangat penting dalam penanganan COVID-19 pada setiap *level* intervensi. Perlu melakukan komunikasi dan edukasi masyarakat terkait protokol kesehatan untuk melawan Covid-19. Kemudian untuk melakukan *contact tracing* dan *tracking* (penyelidikan kasus dan investigasi wabah), serta pelaksanaan vaksinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat.

6. Belum Optimalnya Pembiayaan Kesehatan

Capaian kepesertaan JKN Kota Cimahi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar 93,67% meningkat sebesar 1,97% dibandingkan tahun 2019 yaitu 91.70%. Pencapaian UHC (Universal Health Coverage) di Kota Cimahi perlu menjadi prioritas, ketika UHC tercapai maka masyarakat Kota Cimahi akan mendapatkan jaminan kesehatan di fasilitas kesehatan dan masyarakat yang belum terdaftar bisa diajukan langsung sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran jika memerlukan pelayanan kesehatan. Percepatan UHC ini memerlukan ketersediaan data masyarakat miskin dan tidak mampu yang update dan valid dalam rangka perhitungan peserta PBI, dimana premi dibayarkan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Pencapaian UHC di Kota Cimahi perlu menjadi prioritas. Perlu meningkatkan kesadaran masyarakat agar secara mandiri menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Selain itu ketersediaan data masyarakat kurang mampu yang valid sangat diperlukan dalam rangka perhitungan peserta PBI (penerima bantuan iuran) yang preminya dibayar Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

D. TELAAH TERHADAP USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan rencana kerja tahun 2022 tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan lintas sektor. Melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RW, Kelurahan, Kecamatan terdapat usulan-usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat dan lintas sektor yang merupakan salah satu bentuk konsultasi publik.

Perencanaan yang bersifat bottom up ini akan mengkomodir usulan-usulan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan di dinas kesehatan. Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2021 tingkat Kecamatan se-Kota Cimahi untuk perencanaan kegiatan tahun 2022, didapatkan beberapa usulan masyarakat di bidang kesehatan.

Tabel 2. 9 Usulan Musrenbang Bidang Kesehatan Tahun 2022

| No | Kegiatan | Lokasi | Alasan |
|----|---|--------|--|
| 1. | Pengembangan pembiayaan kesehatan : - Pembiayaan SKTM masih tinggi - Pembiayaan di RS belum efisien. - Penambahan kuota KIS - Keterkaitan lintas sektor : Kelurahan, Kecamatan, DINSOSP2KBP3A | Cimahi | Optimalisasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data kepesertaan JKN. Tingginya peserta yang menunggak iuran pada segmen PBPU Perlu ditingkatkannya keikutsertaan segmen PPU dalam program JKN |
| 2. | Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat | Cimahi | Masih belum optimalnya pelayanan kesehatan di masyarakat |
| 3. | Penanggulangan HIV AIDS, bahaya Narkoba - Meningkatnya Kasus HIV AIDS - Keterkaitan lintas sektor : BNN Kota Cimahi, Disdikpora | Cimahi | Kurangnya pengetahuan tentang HIV AIDS, bahaya naroba dan meningkatnya perilaku tidak sehat / penyimpangan perilaku, seperti penyalahgunaan narkoba (penasun, obat-obatan) |

Tabel 2. 10 Sinkronisasi usulan Musrenbang Kecamatan dengan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022

| USULAN MUSYAWARAH KECAMATAN | | | RENJA DINAS KESEHATAN | | |
|-----------------------------|--|--|---|---|--|
| No | Kelompok Usulan | Lokasi | Program | Kegiatan | Sub. Kegiatan |
| 1. | - Pelayanan JAMKESMAS, JAMKESDA, JAMPERSAL DAN BPJS - Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Penambahan Kuota KIS) | Kec Cimahi Utara : Cibabat, Pasirkaliki Kec Cimahi Tengah : Semua Kelurahan Kec Cimahi Selatan : Cibeureum, Melong, Cibeber, Leuwigajah, dan Utama | Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dan Perorangan | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
| 2. | Peningkatan Kesehatan Masyarakat | Kec Cimahi Utara : Pasir Kaliki dan Citeureup Kec Cimahi Tengah : Semua Kelurahan Kec Cimahi Selatan : | Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan | Peningkatan Kesehatan Masyarakat | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
| 3. | Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS | Kec Cimahi Utara: Cipageran dan Pasir Kaliki Kec Cimahi Tengah : Padasuka, Cimahi dan Baros Kec Cimahi Selatan : Kec Cimahi Selatan : Leuwigajah dan Melong | Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV AIDS |

Berdasarkan hasil usulan musrenbang di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di setiap kecamatan sangat mengharapkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan terutama yang berkaitan dengan Pelayanan JKN, penambahan kepesertaan, penyuluhan kesehatan tentang Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS. Dalam kaitannya dengan penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Kesehatan tahun 2022 maka usulan-usulan tersebut kemudian disandingkan dengan program dan kegiatan yang telah tercantum dalam Renstra dinas kesehatan tahun 2017-2022.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH

A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Kesehatan tahun 2022 memasuki tahun kelima dari Renstra Dinas Kesehatan periode 2017-2022. Sejak tahun 2021 Renstra Dinas Kesehatan mengalami perubahan untuk periode dua tahun terakhir yaitu 2021-2022 mengikuti RPJMD Kota Cimahi. Seperti kita ketahui bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pencapaian visi misi daerah, karena dalam perencanaan tersebut terdapat kegiatan, tahapan, maupun strategi dalam mencapai target akhir pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi daerah. Dalam konteks nasional, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan PP No 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran. Penganggaran memiliki peranan penting agar perencanaan dapat terlaksana secara optimal.

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya *output* dari perencanaan adalah penganggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah, menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah. Dokumen RKPD dan APBD merupakan dokumen perencanaan dan anggaran yang saling berkaitan, sehingga perlu

adanya penekanan sinkronisasi antara dokumen APBD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah seperti Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah menjadi acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik. Penyusunan dokumen perencanaan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan rencana kerja tahunan telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan hingga musrenbang nasional. Pemerintah pusat telah menyiapkan strategi dalam upaya perbaikan akibat wabah pandemik ini.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2022, Program pembangunan Daerah selaras dengan tujuh prioritas nasional dalam sasaran pembangunan dan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan arah kebijakan. Kedua mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan arah kebijakan yang mengurangi ketimpangan antar wilayah. Prioritas ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan arah kebijakan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui penurunan angka kelahiran total dan memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan arah kebijakan memperkuat gerakan nasional revolusi mental. Prioritas nasional kelima, memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan

infrastruktur pelayanan dasar, kemudian, prioritas keenam untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan arah kebijakan pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Terutama penanganan limbah B3 medis pasca pandemi covid 19 serta peningkatan kualitas udara, air, laut dan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat. Terakhir, prioritas ketujuh, adalah memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, HAM dan transformasi pelayanan publik dengan arah kebijakan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi.

Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, diberi kewenangan dalam penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu atau refofusing perubahan alokasi penggunaan APBD. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2022 tidak terlepas dari tema pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Barat yaitu “Pemulihan ekonomi“, dengan 9 (Sembilan) prioritas pembangunan daerah yaitu terdiri dari:

1. Reformasi sistem kesehatan,
2. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi,
3. Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan,
4. Reformasi sistem perlindungan sosial,
5. Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan.
6. Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana,
7. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah,
8. Gerakan membangun desa,
9. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara,
10. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup,
11. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.

Adapun issue strategis di tahun 2022 untuk pembangunan daerah di provinsi Jawa Barat, antara lain:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
5. Reformasi birokrasi

Berkaitan dengan program dan kegiatan prioritas yang merupakan target pembangunan dalam RPJMN IV tidak terlepas dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Cimahi. Salah satunya dibidang kesehatan terdapat beberapa program dan kegiatan yang masih merupakan pekerjaan rumah pemerintah daerah untuk dilanjutkan dalam periode pembangunan selanjutnya. Beberapa upaya yang dilakukan untuk melanjutkan Pembangunan di bidang kesehatan, antara lain untuk :

1. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
2. Revitalisasi sarana dan prasarana kesehatan
3. Promotif dan Preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
4. Mempercepat Penurunan Stunting
5. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin

Terdapat beberapa program kegiatan nasional yang merupakan program pembangunan kesehatan untuk tahap selanjutnya, akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan wujud dari tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Cimahi untuk mendukung pencapaian Misi Kepala daerah terutama pada misi **pertama**, yaitu **“meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul”** memiliki tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Selama periode 5 tahun, Dinas Kesehatan memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui misi dan misi dengan memperhatikan sasaran pokok dan arah kebijakan yang ada dalam RPJMD dan RPJPD kota Cimahi.

Adapun tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan renja tahun 2022 tidak terlepas dari Renstra Dinas Kesehatan 2017-2022. Dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui indikator kinerja pencapaian Indeks Kesehatan pada tahun 2022 sebesar 83.12%. Indeks Kesehatan merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai. Indeks kesehatan merupakan indikator untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat. Hasil capaian untuk IPM Jawa Barat dan Kota Cimahi tahun 2020 adalah masing-masing sebesar 72.09 dan 77,83, hasil ini berada diatas capaian IPM Nasional yaitu 71.94. Sedangkan untuk sasaran renja Dinas Kesehatan tahun 2022 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui 2 (tiga) yaitu Ratio kematian ibu dan Ratio kematian bayi. Berikut adalah tabel dari tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan tahun 2022.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2022

| Tujuan | Indikator Kinerja | Target | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Target |
|---|--------------------------|---------------|---|--------------------------------|---------------|
| Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan | 83,12 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Ratio Kematian Ibu | 115,5 |
| | | | | Ratio Kematian Bayi | 6,4 |

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia khususnya di Kota Cimahi tidak terlepas dari komitmen global untuk turut serta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan derajat kesehatan manusia Indonesia. Komitmen global bersama saat ini merupakan upaya melanjutkan program Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Capaian indikator SDGs di Kota Cimahi tahun 2020 yang belum mencapai target dan perlu mendapat perhatian adalah pada

indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi (37,82%), Persentase ibu hamil KEK (52,94), Persentase Peningkatan kategori keluarga sehat (62,40), dan Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV (79,45). Keempat indikator tersebut capaiannya masih jauh dari yang ditargetkan, dengan demikian untuk di tahun 2022 perlu dibuatkan rencana aksi yang lebih aplikatif dan efektif agar target-target dari indikator SDGs dapat dicapai secara optimal. Berikut hasil pencapaian indikator SDGs dalam bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2020.

Tabel 3. 2 Capaian Indikator SDGs terkait Bidang Kesehatan Tahun 2020

| NO | INDIKATOR KOTA | TAHUN 2020 | | |
|-----|--|------------|---------|-----------|
| | | TARGET | CAPAIAN | % KINERJA |
| 1. | Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional | 92,0 | 93,67 | 101,82 |
| 2. | Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin | 100 | 94,21 | 94,21 |
| 3. | Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap | 93,0 | 85,91 | 92,38 |
| 4. | Persentase akses penduduk terhadap air minum berkualitas | 84,0 | 97,76 | 116,38 |
| 5. | Persentase akses penduduk terhadap jamban sehat | 71,5 | 80,00 | 111,89 |
| 6. | Rasio Rumah Layak Huni (Persentase Rumah Sehat) | 66 | 67,72 | 102,61 |
| 7. | Prevalensi kurang gizi (Balita) | < 10 | 7,70 | 100,00 |
| 8. | Prevalensi stunting pada baduta | < 12,04 | 9,81 | 100,00 |
| 9. | Persentase ibu hamil KEK | 2,38 | 3,15 | 52,94 |
| 10. | Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100 | 91,67 | 91,67 |
| 11. | AKI (per 100.000 kelahiran hidup) | 101 | 115 | 85,54 |
| 12. | Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin | 100 | 94,21 | 94,21 |
| 13. | AKB (per 1000 kelahiran hidup) | 7 | 6,6 | 105,71 |
| 14. | Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap | 93,0 | 85,91 | 92,38 |
| 15. | Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | 100 | 79,45 | 79,45 |
| 16. | Angka Bebas Jentik (ABJ) | ≥ 95 | 88,73 | 93,40 |
| 17. | Persentase obat pelayanan kesehatan dasar (sesuai Fornas) yang telah diajukan oleh puskesmas | 100 | 100 | 93,40 |
| 18. | Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasilitas pelayanan kesehatan | 9 | 9,81 | 109,00 |
| 19. | Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi | 100 | 37,82 | 37,82 |
| 20. | Persentase Peningkatan kategori keluarga sehat | 5 | 3,12 | 62,40 |

| | | | | |
|-----|--|-----|-----|--------|
| 21. | Persentase pembiayaan kesehatan bagi PBI JKN Kota Cimahi (60 % dari premi) | 100 | 100 | 100,00 |
| 22. | Jumlah Kelurahan ODF | 2 | 2 | 100 |

Pelaksanaan program SDGs sejalan dengan pelaksanaan program SPM bidang kesehatan yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan. Saat ini pemerintah daerah telah melaksanakan SPM bidang kesehatan yang mengacu pada Permenkes Nomor 4 tahun 2019. Implementasi pelaksanaan SPM yang dilaksanakan oleh puskesmas yang merupakan ujung tombak yang langsung terlibat dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

Pada penyusunan program dan kegiatan tahun 2022, mengacu pada Permendagri nomor 90 tahun 2019. Dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran serta memperhatikan kebijakan dan kondisi yang ada maka untuk memperjelas cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah melalui strategi pembangunan kesehatan, kebijakan dan program kerja sebagai berikut :

1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Kesehatan 2017-2022, yaitu 5 (lima) strategi yaitu:

1. Mengembangkan upaya-upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan perorangan
2. Meningkatkan kualitas penyediaan pelayanan kesehatan
3. Meningkatkan cakupan pembiayaan kesehatan
4. Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan
5. Meningkatkan kualitas aparatur

Setiap strategi akan dijabarkan dalam beberapa arah kebijakan. Arah kebijakan yang ditetapkan sebanyak 16 dengan pembagian 13 kebijakan di bidang dan 3 kebijakan di sekretariat.

2. Kebijakan

Arah kebijakan merupakan langkah selanjutnya dalam penyusunan Renstra perangkat daerah setelah penetapan strategi. Urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun mendatang dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.

Arah kebijakan merupakan pedoman yang mengarahkan pada pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas serta fungsi perangkat daerah yang lebih tepat, fokus dan rasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Arah kebijakan membantu untuk memperjelas strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Tabel 3. 3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan 2017 – 2022

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|--|--|
| Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 1. Mengembangkan upaya-upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan perorangan | 1. Meningkatkan Pelayanan kesehatan ibu dan Anak di wilayah kerja puskesmas |
| | | | 2. Pemberian dan pemantauan bantuan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil kurang gizi |
| | | | 3. Inovasi Promosi upaya preventif sejak usia dini |
| | | | 4. Promosi hidup bersih dan sehat bagi masyarakat |
| | | | 5. Pemantauan kesehatan makanan dan minuman khususnya yang beredar di sekolah-sekolah |
| | | | 6. Pengembangan pelayanan konsultasi kesehatan secara pro aktif |
| | | | 7. Pembinaan dan pemantauan pengelolaan pemukiman bersih (intervensi di |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--------|---------|---|---|
| | | | perubahan perilaku melalui penyuluhan dan pemicuan) |
| | | | 8. Identifikasi dan pencegahan penyakit menular |
| | | | 9. Peningkatan cakupan imunisasi |
| | | | 10. Optimalisasi program-program kesehatan inklusif |
| | | 2. Meningkatkan kualitas penyediaan pelayanan kesehatan | 1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di fasyankes |
| | | | 2. Pengembangan sistem informasi dan aplikasi pelayanan rujukan |
| | | 3. Meningkatkan cakupan pembiayaan kesehatan | Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Cimahi |
| | | 4. Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan | 1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan |
| | | | 2. Peningkatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan |
| | | 5. Meningkatkan kualitas aparatur | Peningkatan kapasitas aparatur penyelenggaraan pemerintahan |

3. Program, Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2022 yaitu:

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pembangunan Puskesmas
 - 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 - 3) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- 4) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 5) Pengadaan Obat, Vaksin
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - 11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - 12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - 13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - 14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
 - 15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - 16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - 17) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - 18) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - 19) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - 20) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
 - 21) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - 22) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

- 23) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- 24) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
3. Peningkatan Pelayanan BLUD
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Puskesmas Cibeber
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cimahi Selatan
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cimahi Tengah
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cimahi Utara
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Puskesmas Cibeureum
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cigugur Tengah
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cipageran
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Citeureup
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Leuwigajah
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Melong Asih
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Melong Tengah
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pasirkaliki
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Padasuka
4. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
5. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
6. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
 - 1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

- 2) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
 - 3) Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
7. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
- III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
 2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
 - 2) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- IV. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 2) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan

Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 3. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- V. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
 3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

Tabel 3. 4 Rumusan rencana program dan Kegiatan tahun 2022 serta perkiraan maju tahun 2023 Berdasarkan Forum OPD Bidang Kesehatan

RANCANGAN AWAL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN KOTA TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|--|---|--------------------|--|--------------------------------|-------------|-----------------|--|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| I. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 1) Nilai LAKIP PD 2) Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara 3) Kehadiran Pegawai minimal 4) Penyerapan Anggaran | Cimahi | BB (78) 100 Persen > 96 persen 81 persen | 64.004.947.848 | APBD KOTA | - | BB (78) 100 Persen > 96 persen 81 persen | 64.004.947.848 |
| 1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Yang Disusun; | | 3 dokumen | 51.501.800 | | | 3 dokumen | 51.501.800 |
| 01. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen anggaran Jumlah Dokumen Renja Dinas Jumlah Dokumen Renja Perubahan Jumlah Dokumen Renstra Dinas Jumlah Penyelenggaraan | | 6 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kegiatan | 27.001.900 | | | 6 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kegiatan | 27.001.900 |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|---|--|--------------------|--|--------------------------------|-------------|-----------------|--|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| | | Forum Perangkat Daerah | | | | | | | |
| 02. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen LAKIP Jumlah Dokumen Laporan SPM Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ Jumlah Dokumen Monev Kinerja | | 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 7 Dokumen | 24.499.900 | | | 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 7 Dokumen | 24.499.900 |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun; | | 1 dokumen | 37.438.582.219 | | | 1 dokumen | 37.438.582.219 |
| 03. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan | | 380 Orang | 37.317.882.219 | | | 380 Orang | 37.317.882.219 |
| 04. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan | | 12 Dokumen | 120.700.000 | | | 12 Dokumen | 120.700.000 |
| 3. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai Yang Dibina; | | 390 Orang | 319.905.000 | | | 390 orang | 319.905.000 |
| 05. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah set pakaian kerja lapangan pegawai | | 100 set | 24.905.000 | | | 100 set | 24.905.000 |
| 06. | Bimbingan Teknis | Jumlah pegawai yang | | 23 Pegawai | 295.000.000 | | | 23 Pegawai | 295.000.000 |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|--|--|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| | Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | difasilitasi bimtek | | | | | | | |
| 4. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum; | | 12 bulan | 727.909.100 | | | 12 bulan | 727.909.100 |
| 07. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan | | 12 bulan | 10.002.600 | | | 12 bulan | 10.002.600 |
| 08. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan/ peralatan kantor; Jumlah bulan Penyediaan ATK Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor | | 12 bulan 12 Bulan 15 Unit | 134.307.700 | | | 12 bulan 12 Bulan 15 Unit | 134.307.700 |
| 09. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah set peralatan rumah tangga | | 5 set | 61.724.300 | | | 5 set | 61.724.300 |
| 10. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat | | 12 bulan | 133.131.200 | | | 12 bulan | 133.131.200 |
| 11. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan cetakan dan penggandaan | | 12 Bulan | 213.751.300 | | | 12 Bulan | 213.751.300 |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|--|---|--------------------|---|--------------------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| 12. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Bulan Fasilitasi, Koordinasi, dan Konsultasi | | 12 Bulan | 174.992.000 | | | 12 Bulan | 174.992.000 |
| 5. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum; | | 12 Bulan | 204.038.481 | | | 12 Bulan | 204.038.481 |
| 13. | Pengadaan Mebel | Jumlah paket pemeliharaan mebeleur, Jumlah pengadaan lemari, Jumlah pengadaan Rak penyimpanan Medik, Jumlah pengadaan Troly makanan, Jumlah pengadaan Tempat Tidur, Jumlah pengadaan kursi, Jumlah pengadaan meja | | 1 paket 9 unit 1 paket 2 unit 4 unit 25 unit | 204.038.481 | | | 1 paket 9 unit 1 paket 2 unit 4 unit 25 unit | 204.038.481 |
| 6. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum; | | 12 Bulan | 1.262.034.600 | | | 12 Bulan | 1.262.034.600 |
| 14. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | (1).Jumlah Bulan Jasa Air; (2).Jumlah Bulan Jasa Komunikasi;(3).Jumlah Bulan Jasa Listrik; | | 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan | 378.000.000 | | | 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan | 378.000.000 |
| 15. | Penyediaan Jasa | Jumlah bulan kebersihan | | 12 Bulan | 884.034.600 | | | 12 Bulan | 884.034.600 |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|--|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| | Pelayanan Umum Kantor | kantor | | | | | | | |
| 7. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah; | \ | 12 bulan | 2.107.775.000 | | | 12 bulan | 2.107.775.000 |
| 16. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah bulan pemberian BBM Jumlah unit kendaraan Jumlah Unit Kendaraan yang diservice | | 12 Bulan 27 Unit 3 Unit | 994.650.000 | | | 12 Bulan 27 Unit 3 Unit | 994.650.000 |
| 17. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor | | 12 Bulan | 1.113.125.000 | | | 12 Bulan | 1.113.125.000 |
| 8. | Peningkatan Pelayanan BLUD | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | | 21.893.201.648 | | | | 21.893.201.648 |
| 18. | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Padasuka | | 25836 orang | 2.029.174.500 | | | 25836 orang | 2.029.174.500 |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Melong Asih | | 20608 orang | 1.874.077.000 | | | 20608 orang | 1.874.077.000 |
| | Pelayanan dan Penunjang | Jumlah peserta JKN di | | 12286 orang | 1.036.364.500 | | | 12286 orang | 1.036.364.500 |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|----|--|---|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| | Pelayanan BLUD | wilayah kerja puskesmas Melong Tengah | | | | | | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah peserta JKN di wilayah Puskesmas Cigugur tengah | | 21784 orang | 1.714.924.000 | | | 21784 orang | 1.714.924.000 |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | jumlah peserta JKN di wilayah puskesmas Cimahi Selatan | | 21503 orang | 1.856.114.000 | | | 21503 orang | 1.856.114.000 |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | .Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cipageran | | 23964 orang | 1.949.459.500 | | | 23964 orang | 1.949.459.500 |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cimahi Tengah | | 24961 orang | 2.006.923.300 | | | 24961 orang | 2.006.923.300 |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | jumlah peserta JKN di wilayah Puskesmas Citeureup | | 18486 orang | 1.388.284.000 | | | 18486 orang | 1.388.284.000 |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cimahi Utara | | 29362 orang | 2.703.335.348 | | | 29362 orang | 2.703.335.348 |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah Peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Pasirkaliki | | 9450 orang | 719.287.000 | | | 9450 orang | 719.287.000 |
| | Pelayanan dan Penunjang | Jumlah peserta JKN di | | 28063 orang | 2.216.226.000 | | | 28063 orang | 2.216.226.000 |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|---|---|--------------------|--|--------------------------------|-------------|-----------------|--|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| | Pelayanan BLUD | wilayah kerja Puskesmas Cibeureum | | | | | | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cibeber | | 13269 orang | 1.045.759.000 | | | 13269 orang | 1.045.759.000 |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas Leuwigajah | | 16230 orang | 1.353.273.500 | | | 16230 orang | 1.353.273.500 |
| II. | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1) Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Utama 2) Rata-rata tingkat capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang diterapkan 3) Prevalensi stunting pada baduta 4) Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional (Pencapaian UHC) 5) Persentase Faskes Yang Mendapatkan Rekomendasi / Ijin 6) Cakupan keberhasilan | | 69,23 persen 83 persen 10,80 persen 96 persen 100 Persen 92 Persen 90 Persen 100 Persen | 57.454.923.124 | APBD KOTA | | 69,23 persen 83 persen 10,80 persen 96 persen 100 Persen 92 Persen 90 Persen 100 Persen | 57.454.923.124 |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|---|---|--------------------|--|--------------------------------|-------------|-----------------|--|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| | | Pengobatan TB 7) Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap 8) Persentase Kasus dan KLB yang ditangani | | | | | | | |
| 9. | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Puskesmas Dengan Sarana Dan Prasarana Sesuai Standar; | | 13 Puskesmas | 23.468.488.574 | | | 13 Puskesmas 23.468.488.574 | |
| 19. | Pembangunan Puskesmas | Pembangunan gedung baru puskesmas | | 2 Puskesmas | 15.327.292.000 | | | 2 Puskesmas 15.327.292.000 | |
| 20. | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah bulan penyewaan gedung / gudang jumlah ipal yang diperbaiki jumlah puskesmas yang melaksanakan rehabilitasi jumlah puskesmas yang melaksanakan dan pemeliharaan | | 6 bulan 2 unit 13 puskesmas 2 Puskesmas | 2.118.347.675 | | | 6 bulan 2 unit 13puskesmas 2 Puskesmas 2.118.347.675 | |
| 21. | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan | | 2 Puskesmas | 832.000.000 | | | 2 Puskesmas 832.000.000 | |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|--|--|--------------------|--|--------------------------------|-------------|-----------------|--|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| 22. | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah pengadaan alat kesehatan di pelayanan kesehatan Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pemeliharaan alat kesehatan / penunjang medik | | 7 unit 3 Puskesmas | 1.081.900.000 | | | 7 unit 3 Puskesmas | 1.081.900.000 |
| 23. | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah jenis BMHP Jumlah jenis pengadaan obat Jumlah pengadaan Vaksin | | 60 Jenis 100 Jenis 1 Jenis | 4.108.948.899 | | | 60 Jenis 100 Jenis 1 Jenis | 4.108.948.899 |
| 10. | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Puskemas Dengan Sarana Dan Prasarana Sesuai Standar; | | 13 Puskesmas | 33.706.735.580 | | | 13 Puskesmas | 33.706.735.580 |
| 24. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah kegiatan pelaksanaan pemeriksaan ibu hamil oleh tenaga SPOG Jumlah peserta Pertemuan sosialisasi program | | 11528 orang 5 kegiatan 300 orang | 155.690.000 | | | 11528 orang 5 kegiatan 300 orang | 155.690.000 |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|--|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| | | kesehatan ibu dan anak | | | | | | | |
| 25. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Penguatan program EMAS | | 11004 Orang 12 Orang | 504.000.000 | | | 11004 Orang 12 Orang | 504.000.000 |
| 26. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; Jumlah peserta Pelatihan/penyeliaan fasilitatif di puskesmas PONED | | 10696 Orang 40 Orang | 120.000.000 | | | 10696 Orang 40 Orang | 120.000.000 |
| 27. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pertemuan reviu PERDA KIBBLA | | 51988 Orang 1 Laporan | 12.099.500 | | | 51988 Orang 1 Laporan | 12.099.500 |
| 28. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pembinaan Sekolah Sehat Pertemuan Program UKS | | 87223 Orang 12 Sekolah 34 Orang | 213.900.000 | | | 87223 Orang 12 Sekolah 34 Orang | 213.900.000 |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|---|---|--------------------|--|--------------------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| 29. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Deteksi dini Faktor Risiko PTM bagi ASN Tingkat Kota Cimahi Deteksi IVA TEST Jasa Petugas Penunjang P2PTM KESWA Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar Penguatan pandu PTM di FKTP Pertemuan Usia Produktif Sosialisasi hari Pendengaran Sedunia | | 1250 Orang 1500 Orang 286Orang/hari 368206 Orang 82 Orang 144 Orang 6 Perusahaan | 238.991.400 | | | 1250 Orang 1500 Orang 286Orang/hari 368206 Orang 82 Orang 144 Orang 6Perusahaan | 238.991.400 |
| 30. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah penduduk usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia Pertemuan Program Lanjut usia | | 49506 Orang 30 Orang 70 Orang | 133.050.000 | | | 49506 Orang 30 Orang 70 Orang | 133.050.000 |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|--|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| 31. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah penderita hipertensi usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Pertemuan Program Hipertensi bagi petugas Fasyankes Sosialisasi dan Pelayanan Hipertensi Tingkat Kota Cimahi | | 175157orang 118 orang 450 orang | 103.670.000 | | | 175157orang 118 orang 450 orang | 103.670.000 |
| 32. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah penderita DM usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Pertemuan Program Diabetes Mellitus bagi petugas Fasyankes Sosialisasi dan Pelayanan DM Tingkat Kota Cimahi | | 9638 orang 144 orang 450 orang | 103.670.000 | | | 9638 orang 144 orang 450 orang | 103.670.000 |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|--|--|--------------------|--|--------------------------------|-------------|-----------------|--|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| 33. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah penanganan dan Pendampingan ODGJ Gaduh Gelisah .Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Monitoring dan evaluasi Rakor TPKJM dan NAPZA Pelatihan Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pendampingan pelayanan kesehatan jiwa dan FGD Penguatan Jejaring Lintas Sektor dan Lintas Program Pertemuan program jiwa bagi petugas puskesmas, klinik dan RS | | 288 kali 775 orang 1 kali 1 kali 26 kali 1 kali 2 kali | 171.222.900 | | | 288 kali 775 orang 1 kali 1 kali 26 kali 1 kali 2 kali | 171.222.900 |
| 34. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Bimbingan teknis program TB ke RS dan Puskesmas .Jumlah orang terduga TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai standar Konsultasi Program TB | | 38 kali 11800 orang 4 Kali 6 Kali 10 Kali | 262.313.000 | | | 38 kali 11800 orang 4 Kali 6 Kali 10 Kali | 262.313.000 |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|--|--|--------------------|---|--------------------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| | | Monitoring dan evaluasi Program TB Sosialisasi Program TB | | | | | | | |
| 35. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Bimbingan teknis program Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan program HIV Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standa Konsultasi Program Pertemuan Sosialisasi Program HIV | | 3 Kali 13 kegiatan 14197 Orang 4 Kali 10 Kali | 216.230.000 | | | 3 Kali 13 kegiatan 14197 Orang 4 Kali 10 Kali | 216.230.000 |
| 36. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Penanganan dan Pengiriman Spesimen KLB jumlah peserta konsolidasi dan advokasi PSC Jumlah Peserta Pelatihan Penanganan KLB Pelaksanaan TGC Pelayanan P3K | | 160 Sampel 100 Orang 25 Orang 6 Orang 1 Paket | 2.671.891.280 | | | 160 Sampel 100 Orang 25 Orang 6 Orang 1 Paket | 2.671.891.280 |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|---|--|--------------------|--|--------------------------------|-------------|-----------------|--|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| 37. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana yang ditangani | | | | | | | |
| 38. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Pertemuan Pelayanan Kesehatan Gizi Pengadaan PMT Lokal | | 70 Orang 198 Paket | 1.315.888.400 | | | 70 Orang 198 Paket 1.315.888.400 | |
| 39. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Pelaksana Kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelatihan Kader Pos UKK Pengukuran Kebugaraan Jemaah Haji Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Kesehatan Kerja dan Olahraga Pertemuan Koordinasi dan Persiapan Pengukuran Calon Jemaah Haji | | 286 hari/org 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali | 60.884.000 | | | 286 hari/org 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali | |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|--|--|--------------------|---|--------------------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| 40. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah inspeksi Sarana Air Bersih (SAB) pada industri/fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Jumlah limbah medis yang dikelola Jumlah pelatihan study EHRA | | 1 kali 12 kali 5484kg/tahun 2 dokumen | 475.364.000 | | | 1 kali 12 kali 5484 kg/tahun 2 dokumen | 475.364.000 |
| 41. | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah jenis pengadaan Media Promosi Kesehatan Jumlah media promosi yang mendapatkan pemeliharaan Jumlah pengadaan pendukung PIK Jumlah Penyuluhan di luar Gedung Jumlah penyuluhan Mobile Promosi Kesehatan Jumlah peserta Pembinaan dan monev program | | 7 Jenis 6 Unit 4 Unit 48 Kali 22 Kali 35 Orang | 266.471.400 | | | 7 Jenis 6 Unit 4 Unit 48 Kali 22 Kali 35 Orang | 266.471.400 |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------------|-------------|-----------------|--|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| 42. | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah kegiatan pengelolaan administrasi program surveilans Jumlah Penemuan Kasus Non PD3I Jumlah pertemuan kegiatan Jemaah haji Jumlah sampel penyelidikan epidemiologi (PE) Pembuatan Aplikasi e_surveilans Pertemuan Evaluasi program surveilans Pertemuan Kegiatan SKDR penyakit potensial wabah PD3I | | 13 Kegiatan 12 Laporan 556 Orang 56 Sampe 1 Paket 200 Orang 50 Orang | 113.313.300 | | | 13 Kegiatan 12 Laporan 556 Orang 56 Sampe 1 Paket 200 Orang 50 Orang | 113.313.300 |
| 43. | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Jumlah asuhan keperawatan keluarga yang dilayani sesuai standar Jumlah kunjungan laboratorium Jumlah Kunjungan rawat jalan gigi Jumlah pertemuan | | 4414 KK 55375 Orang 55375 Orang 4 Kali 2 Kali | 120.784.000 | | | 4414 KK 55375 Orang 55375 Orang 4 Kali 2 Kali | 120.784.000 |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|--|---|--------------------|--|--------------------------------|-------------|-----------------|--|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| | | koordinasi PIS-PK Jumlah pertemuan Sistem Pelayanan Rujukan | | | | | | | |
| 44. | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah konsultasi program penyakit menular dan zoonosis Jumlah pertemuan evaluasi program endemik epidemik dan zoonosis Jumlah Pertemuan sosialisasi program endemik epidemik dan zoonosis; Kegiatan pengendalian vektor umlah pertemuan evaluasi dan sosialisasi program (ISPA, Diare dan Hepatitis) | | 8 kali 3 Kali 3 Kali 80 kali 8 kali | 448.278.500 | | | 8 kali 3 Kali 3 Kali 80 kali 8 kali | 448.278.500 |
| 45. | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah dari keluarga miskin yang dikhitan Jumlah ibu hamil atau bersalin yang mendapatkan pelayanan Jampersal Jumlah kegiatan verifikasi | | 75 orang 11052 Orang 12 Bulan 13 bulan 12 bulan 58035 orang 4 Kali | 17.751.712.000 | | | 75 orang 11052 Orang 12 Bulan 13 bulan 12 bulan 58035 orang 4 Kali | 17.751.712.000 |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|--------------------------------------|---|--------------------|--|--------------------------------|-------------|-----------------|--|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| | | JKN Jumlah kegiatan verifikatordalam pengelolaan JKN Jumlah Pembayaran Non Kapitasi Jumlah Pembayaran PBI 60% Jumlah Pertemuan JKN Pembayaran Jamkesda Penyusunan Kerjasama dengan RS di luar PBI | | 12 bulan 2 Kali | | | | 12 bulan 2 Kali | |
| 46. | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah deklarasi ODF Jumlah pembinaan kota sehat tingkat provinsi Jumlah pembinaan kota sehat tk. kota Jumlah pertemuan koordinasi tim pembina kota sehat Jumlah rapat koordinasi pra ODF Jumlah verifikasi tingkat nasional Pembinaan lingkungan | | 9 kelurahan 2 kali 1 kali 12 kali 2 kali 3 kali 1 kali | 69.190.000 | | | 9 kelurahan 2 kali 1 kali 12 kali 2 kali 3 kali 1 kali | 69.190.000 |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|---------------------------------|---|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| | | bersih dan sehat | | | | | | | |
| 47. | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Padasuka | | 25836 orang | 509.560.000 | | | 25836 orang 509.560.000 | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Melong Asih | | 20608 orang | 455.460.000 | | | 20608 orang 455.460.000 | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Melong Tengah | | 12286 orang | 476.960.000 | | | 12286 orang 476.960.000 | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | jumlah peserta JKN di wilayah puskesmas cigugur tengah | | 21784 orang | 668.445.000 | | | 21784 orang 668.445.000 | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | jumlah peserta JKN di wilayah puskesmas cimahi selatan | | 21503 orang | 500.645.000 | | | 21503 orang 500.645.000 | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cipageran | | 23964 orang | 606.785.000 | | | 23964 orang 606.785.000 | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cimahi Tengah | | 24961 orang | 515.445.000 | | | 24961 orang 515.445.000 | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | jumlah peserta JKN di wilayah Puskesmas | | 18486 orang | 546.040.000 | | | 18486 orang 546.040.000 | |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|--|---|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| | | Citeureup | | | | | | | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cimahi Utara | | 29362 orang | 427.860.000 | | | 29362 orang 427.860.000 | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Pasirkaliki | | 9450 orang | 579.575.000 | | | 9450 orang 579.575.000 | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cibeureum | | 28063 orang | 610.393.000 | | | 28063 orang 610.393.000 | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cibeber | | 13269 orang | 481.660.000 | | | 13269 orang 481.660.000 | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas Leuwigajah | | 16230 orang | 632.460.000 | | | 16230 orang 632.460.000 | |
| 48. | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah klinik yang melaksanakan penilaian akreditasi Jumlah Pertemuan Sosialisasi Persiapan Penilaian Akreditasi | | 2 unit 1 kali | 793.841.900 | | | 2 unit 1 kali 793.841.900 | |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|--|---|--------------------|--|--------------------------------|-------------|-----------------|--|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| 49. | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah anak SD yang mendapat Imunisasi Jumlah Audit KIPI Jumlah peserta pertemuan Audit KIPI Jumlah peserta Pertemuan kegiatan BIAS dan IDL Pengambilan Vaksin Rutin, BIAS, Haji dan Logistik | | 30000 Orang 10 Kasus 120 Orang 516 Orang 18 Kali | 372.992.000 | | | 30000 Orang 10 Kasus 120 Orang 516 Orang 18 Kali | 372.992.000 |
| 11. | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | | | | 223.962.970 | | | | 223.962.970 |
| 50. | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah dokumen informasi kesehatan | | 6 Dokumen | 19.579.000 | | | 6 Dokumen | 19.579.000 |
| 51. | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah pemeliharaan sistem dan jaringan LAN pembuatan aplikasi SIMPUS | | 13 Kegiatan 1 Paket | 129.319.200 | | | 13 Kegiatan 1 Paket | 129.319.200 |
| 52. | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Jumlah perangkat Sistem Informasi Kesehatan | | 23 unit | 75.064.770 | | | 23 unit | 75.064.770 |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|------|--|---|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| 12. | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 55.736.000 | | | 55.736.000 | |
| 53. | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pertemuan Pembinaan RS dan Faskes; | | 2 kali | - | | | 2 kali - | |
| 54. | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas Jumlah laporan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat | | 1 dokumen 1 laporan 2 kali | 55.736.000 | | | 1 dokumen 1 laporan 2 kali 55.736.000 | |
| III. | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Essensial | | 95 Persen | 17.400.100 | APBD KOTA | | 95 Persen 417.400.100 | |
| 13. | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | - | | | - | |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|--|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| 55. | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | - | | | - | |
| 14. | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Profil Rencana kebutuhan SDM ; | | 1 dokumen | 417.400.100 | | | 1 dokumen 417.400.100 | |
| 56. | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | | | | - | | | - | |
| 57. | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah pembinaan jabatan fungsional Jumlah pembinaan tenaga kesehatan teladan Jumlah Pertemuan pembinaan SDM per profesi Jumlah Pertemuan Penyusunan informasi tenaga kesehatan | | 4 kali 3 kali 9 kali 2 kali | 417.400.100 | | | 4 kali 3 kali 9 kali 2 kali 417.400.100 | |
| IV. | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Essensial | | 100 Persen | 92.415.000 | | | 100 Persen 92.415.000 | |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|---|---|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| 15. | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah apotik dan toko obat yang memiliki ijin; | | | 25.000.000 | | | 25.000.000 | |
| 58. | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah pengawasan dan pembinaan terhadap sarana kantin / warung sekolah Jumlah sarana IRTP yang diaudit Jumlah pertemuan pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan Jumlah realisasi pemanfaatan anggaran BOK kefarmasian Jumlah sarana kesehatan yang mendapat bimbingan dan pengawasan | | 10 kali 10 kali 40 sarana | 25.000.000 | | | 10 kali 10 kali 40 sarana 25.000.000 | |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|---|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| 59. | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | - | | | - | |
| 16. | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah laporan hasil pemeriksaan makanan dan minuman; | | | 59.490.000 | | | 59.490.000 | |
| 60. | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, | Jumlah pertemuan PKP yang Dilaksanakan Jumlah sampel yang dilakukan pemeriksaan post market Jumlah sarana IRT yang diaudit | | 2 Kali 50 sampel 100 Sarana | 59.490.000 | | | 2 Kali 50 sampel 100 Sarana 59.490.000 | |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|---|--|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| | untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | | | | |
| 17. | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Pengawasan ; | | | 7.925.000 | | | 7.925.000 | |
| 61. | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Jasa Boga atau Rumah makan yang telah memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jumlah peserta orientasi Higiene Sanitasi jasa boga atau rumah makan | | 5 Unit 20 Orang | 7.925.000 | | | 5 Unit 20 Orang | |
| V. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG | Cakupan Rumah Tangga ber PHBS | | 54 Persen | 4.675.472.400 | APBD KOTA | | 54 Persen | |
| | | | | | | | | 4.675.472.400 | |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----|---|--|--------------------|---|--------------------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| | KESEHATAN | | | | | | | | |
| 18. | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah mitra yang mendukung kegiatan Germas Tingkat Kota; | | | 4.472.656.400 | | | | 4.472.656.400 |
| 62. | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Pembinaan dan Pengembangan SBH Pembinaan/Penguatan Kemitraan GERMAS Tingkat Kota Pengiriman Kontingen SBH Pertemuan Advokasi dan Penyusunan Perwal KTR Seminar Implementasi KTR di Sekolah | | 30 Orang 2 kali 15 Orang 1 Dokumen 50 Sekolah | 4.472.656.400 | | | 30 Orang 2 kali 15 Orang 1 Dokumen 50 Sekolah | 4.472.656.400 |
| 19. | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pokja Kelurahan Siaga yang dibina ; | | | 172.872.000 | | | | 172.872.000 |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--------|--|---|--------------------|--|--------------------------------|-------------|-----------------|--|-----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Kinerja Maju | Pagu Indikatif |
| 63. | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Pokja Kelurahan Siaga yang dibina .Monitoring dan evaluasi pendataan PHBS rumah tangga Pembinaan RW Siaga dan evaluasi implementasi inovasi Germas Promosi kesehatan dan Penggerak masyarakat dalam Hari Tanpa Tembakau | | 15 unit 60 Orang 15Kelurahan 526 Orang | 172.872.000 | | | 15 unit 60 Orang 15Kelurahan 526 Orang | 172.872.000 |
| 20. | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah UKBM di kelurahan yang dibina; | | | 29.944.000 | | | | 29.944.000 |
| 64. | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Pembinaan UKBM Percontohan Pertemuan Penyusunan Laporan Bagi Kader | | 15Kelurahan 150 Orang | 29.944.000 | | | 15Kelurahan 150 Orang | 29.944.000 |
| JUMLAH | | | | | 126.645.158.472 | | | | 126.645.158.472 |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana kerja tahun 2022 merupakan periode kelima (tahun terakhir) dari pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan 2017-2022. Dalam penyusunan rencana kerja tahun 2022 ini, program dan kegiatan mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Perubahan 2017-2022 dimana pada tahun 2021 telah mengalami perubahan (tahun kedua perubahan), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi 2017-2022, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2018-2023, Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2019-2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan memperhitungkan kesesuaian kebutuhan dan kekuatan yang dimiliki, sebagai upaya untuk dapat mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Jumlah anggaran belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp. 114.296.371.573,-, dengan sumber dari APBD sebesar Rp. 95.434.371.573,- (83,49%) dan Dana Kapitasi JKN sebesar 18.862.000.000,- (16,51%), sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4. 1 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2022 berdasarkan Sumber Anggaran

| NO | SUMBER ANGGARAN | PAGU ANGGARAN (Rp) | % |
|----|-----------------|--------------------------|---------------|
| 1 | APBD KOTA | 95.434.371.573 ,- | 83,49 |
| 2 | KAPITASI JKN | 18.862.000.000,- | 16,51 |
| | TOTAL | 114.296.371.573,- | 100,00 |

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2022 terdiri dari 5 program, 18 kegiatan dan 72 sub kegiatan. Uraian Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 Berikut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022 berdasarkan Dokumen RKPD

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2022 | | | | Prakiraan Maju Tahun 2023 | | Perangkat Daerah |
|----|--|--|--------------------|------------------------|----------------|-------------|---------------------------|----------------|------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | |
| | URUSAN KESEHATAN | | | | | | | | |
| | BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Cimahi | 78 Nilai | 64.056.811.099 | APBD | 78 Nilai | 64.056.811.099 | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum | | 100 Persen | | | 100 Persen | | |
| | | Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi | | 100 Persen | | | 100 Persen | | |
| 1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Yang Disusun; | Cimahi | 3 Dokumen | 51.501.800 | APBD | 3 Dokumen | 51.501.800 | Dinas Kesehatan |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen anggaran | | 4 Dokumen | 27.001.900 | | 4 Dokumen | 27.001.900 | |
| | | Jumlah Dokumen Renja Dinas | | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | | |
| | | Jumlah Dokumen Renja Perubahan | | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | | |
| | | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | | | 0 Dokumen | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------|------------|----------------|------|------------|----------------|-----------------|
| | | Renstra Dinas | | | | | | | |
| | | Laporan Anggaran (Siscobikes) | | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | | |
| | | Jumlah Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah | | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | | |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen LAKIP | | 1 Dokumen | 24.499.900 | | 1 Dokumen | 24.499.900 | |
| | | Jumlah Dokumen Laporan SPM | | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | | |
| | | Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ | | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | | |
| | | Jumlah Dokumen Monev Kinerja | | 5 Dokumen | | | 4 Dokumen | | |
| 2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun; | Cimahi | 1 Dokumen | 58.129.740.418 | APBD | 1 Dokumen | 58.129.740.418 | Dinas Kesehatan |
| 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan | | 416 orang | 58.009.040.418 | APBD | 416 orang | 58.009.040.418 | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan | | 12 Dokumen | 120.700.000 | APBD | 12 Dokumen | 120.700.000 | |
| | | Jumlah peserta pertemuan penyusunan laporan keuangan | | 290 orang | | | 290 orang | | |
| 3 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai Yang Dibina; | Cimahi | 100 Orang | 319.905.000 | APBD | 416 Orang | 319.905.000 | Dinas Kesehatan |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|-------------|---------------|------|-------------|---------------|-----------------|
| 5 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya | Jumlah set pakaian kerja lapangan pegawai | | 85 Set | 24.905.000 | APBD | 85 Set | 24.905.000 | |
| 6 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek | | 23 Pegawai | 295.000.000 | APBD | 23 Pegawai | 295.000.000 | |
| | | Jumlah peserta pembinaan pegawai | | 390 Pegawai | | | 390 Pegawai | | |
| 4 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum; | Cimahi | 12 Bulan | 1.031.815.800 | APBD | 12 Bulan | 1.031.815.800 | Dinas Kesehatan |
| 7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | 12 Bulan | 10.002.600 | APBD | 12 Bulan | 10.002.600 | |
| 8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan/peralatan kantor | | 12 Bulan | 134.307.700 | APBD | 12 Bulan | 134.307.700 | |
| | | Jumlah bulan Penyediaan ATK | | 12 Bulan | | | 12 Bulan | | |
| | | Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor | | 1 Unit | | | 1 Unit | | |
| 9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga | | 1 Paket | 61.724.300 | APBD | 1 Paket | 61.724.300 | |
| | | Jumlah unit belanja modal peralatan rumah tangga | | 9 Unit | | | 9 Unit | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|----------|---------------|------|----------|---------------|-----------------|
| 10 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman | | 12 Bulan | 183.131.200 | APBD | 12 Bulan | 183.131.200 | |
| 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | 12 Bulan | 192.650.000 | APBD | 12 Bulan | 192.650.000 | |
| 12 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Bulan Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi | | 12 Bulan | 450.000.000 | APBD | 12 Bulan | 450.000.000 | |
| 5 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah bulan Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan | Cimahi | 12 Bulan | 254.038.481 | APBD | 12 Bulan | 254.038.481 | Dinas Kesehatan |
| 13 | Pengadaan Mebel | Jumlah pemeliharaan kursi | | 0 Unit | 254.038.481 | APBD | 0 Unit | 254.038.481 | |
| | | Jumlah pengadaan meubelair | | 20 Unit | | | 20 Unit | | |
| 6 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan jasa penunjang urusan | Cimahi | 12 Bulan | 1.562.034.600 | APBD | 12 Bulan | 1.562.034.600 | Dinas Kesehatan |
| 14 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Air | | 12 Bulan | 678.000.000 | APBD | 12 Bulan | 678.000.000 | |
| | | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi | | 12 Bulan | | | 12 Bulan | | |
| | | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Listrik | | 12 Bulan | | | 12 Bulan | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|----------|---------------|------|----------|---------------|-----------------|
| 15 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor | | 12 Bulan | 884.034.600 | APBD | 12 Bulan | 884.034.600 | |
| | | Jumlah tenaga Non ASN yang mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian | | 18 Orang | | | 18 Orang | | |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan | Cimahi | 12 Bulan | 2.707.775.000 | APBD | 12 Bulan | 2.707.775.000 | Dinas Kesehatan |
| 16 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas operasional | | 12 Bulan | 994.650.000 | APBD | 12 Bulan | 994.650.000 | |
| | | Jumlah bulan Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional | | 12 Bulan | | | 12 Bulan | | |
| | | Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan | | 26 Unit | | | 26 Unit | | |
| | | Jumlah tenaga Non ASN yang mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian | | 10 Orang | | | 10 Orang | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|-----------------|
| 17 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Bulan Penyediaan jasa Pemeliharaan Gedung Kantor | | 12 Bulan | 1.713.125.000 | APBD | 12 Bulan | 1.713.125.000 | |
| | | Jumlah tenaga NON ASN yang mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian | | 18 Orang | | | | | 18 Orang |
| | | Jumlah Paket pemeliharaan gedung | | 3 Paket | | | | | 3 Paket |
| II | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Utama | Cimahi | 84,62 persen | 47.161.419.374 | APBD, APBN | 84,62 persen | 41.011.419.374 | Dinas Kesehatan |
| | | Rata-rata tingkat capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang diterapkan | | 83 persen | | | 83 persen | | |
| | | Prevalensi stunting pada balita | | 10,70 persen | | | 10,70 persen | | |
| | | Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional (Pencapaian UHC) | | 97 persen | | | 97 persen | | |
| | | Persentase Faskes Yang Mendapatkan Rekomendasi / Ijin | | 100 Persen | | | 100 Persen | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|--------------|----------------|------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | Tingkat Pengobatan TB yang berhasil | | 90 Persen | | | 90 Persen | | |
| | | Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap | | 90 Persen | | | 90 Persen | | |
| | | Persentase Kasus dan KLB yang ditangani | | 100 Persen | | | 100 Persen | | |
| 9 | Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Puskesmas Dengan Sarana Dan Prasarana Sesuai Standar; | Cimahi | 13 Puskesmas | 11.058.948.899 | APBD, APBN | 13 Puskesmas | 4.908.948.899 | Dinas Kesehatan |
| 19 | Pembangunan Puskesmas | Jumlah Pembangunan gedung baru puskesmas | | 2 Unit | 6.150.000.000 | APBD, APBN | 0 Unit | - | Dinas Kesehatan |
| | | Jumlah Pembangunan sarana IPAL | | 1 Unit | | | 0 Unit | | |
| | | Jumlah laporan perencanaan IPAL | | 0 Laporan | | | 0 Laporan | | |
| | | Jumlah dokumen manajemen Kontruksi | | 0 Laporan | | | 0 Laporan | | |
| | | Jumlah bulan jasa pendukung kegiatan pembangunan puskesmas | | 12 Bulan | | | 12 Bulan | | |
| | | Jumlah dokumen perencanaan pengadaan lahan untuk pembangunan Puskesmas | | 1 dokumen | | | 0 dokumen | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 20 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah dokumen perencanaan | 0 Dokumen | 0 | APBD | 0 Dokumen | 0 |
| | | Jumlah dokumen pengawasan | 0 Dokumen | | | 0 Dokumen | |
| | | Jumlah puskesmas yang melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan | 1 Puskesmas | | | 1 Puskesmas | |
| | | Jumlah peserta rapat persiapan rehabilitasi puskesmas | 0 Orang | | | 0 Orang | |
| 21 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah unit antropometri | 0 unit | 800.000.000 | APBN | 0 unit | 800.000.000 |
| | | Jumlah unit mobil promkes | 0 unit | | | 0 unit | |
| | | Jumlah unit mobil Ambulan SPGDT | 1 Unit | | | 0 unit | |
| | | Jumlah unit mobil Pick up | 1 Unit | | | 0 unit | |
| | | Jumlah unit mobil Box | 1 Unit | | | 0 unit | |
| 22 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah pengadaan alat kesehatan | 0 | 0 | APBD, APBN | 0 | 0 |
| | | Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pemeliharaan alat kesehatan / penunjang medik | 0 | | | 0 | |
| | | Jumlah pengadaan alat kesehatan (AKI/AKB) | 0 | | | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|-----------------|
| 23 | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah jenis pengadaan obat Yandas DAK | | 100 Jenis | 4.108.948.899 | APBD, APBN | 100 Jenis | 4.108.948.899 | |
| | | Jumlah jenis pengadaan obat Covid | | 0 jenis | | | 0 jenis | | |
| | | Jumlah jenis pengadaan Reagen dan BMHP | | 0 Jenis | | | 0 Jenis | | |
| | | Jumlah program yang mendapatkan pengadaan obat | | 2 program | | | 2 program | | |
| | | Jumlah peserta pertemuan pengelola obat dan Perbekkes Puskesmas | | 70 orang | | | 70 orang | | |
| | | Jumlah kegiatan bongkar muat obat | | 100 Kali | | | 100 Kali | | |
| | | Jumlah jenis pengadaan obat Yandas APBD | | 60 Jenis | | | 60 Jenis | | |
| 10 | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1) Jumlah Indikator SPM dengan capaian 83% ; | Cimahi | 12 indikator | 35.828.507.505 | APBD, APBN | 12 indikator | 35.828.507.505 | Dinas Kesehatan |
| | | 2) Peningkatan Cakupan Kepesertaan JKN ; | | 11 persen | | | 1 persen | | |
| | | 3) Cakupan Balita Gizi Buruk yang ditangani | | 100 persen | | | 100 persen | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|--|
| | | 4) Cakupan penyelidikan Epidemiologi yang ditangani | | 100 persen | | | 100 persen | | |
| | | 5) Jumlah Kelurahan ODF | | 6 Kelurahan | | | 6 Kelurahan | | |
| | | 6) Jumlah bulan Laporan Sistem Kewaspadaan Dini Respon (SKDR) ; | | 12 bulan | | | 12 bulan | | |
| 24 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | 10.689 orang | 155.690.000 | APBD, APBN | 10.689 orang | 155.690.000 | |
| | | Jumlah kegiatan pelaksanaan pemeriksaan ibu hamil oleh tenaga SPOG | | 20 kali | | | 20 kali | | |
| | | Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Rumah Sakit Rujukan | | 7 Perjanjian | | | 7 Perjanjian | | |
| | | Jumlah kegiatan pendampingan HPK | | 600 kali | | | 600 kali | | |
| | | Jumlah kunjungan supervisi AKI & AKB ke fasyankes tingkat pertama & rujukan | | 0 kali | | | 0 kali | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------------|
| | | Jumlah peserta konvergensi LP/ LS untuk penurunan AKI/ AKB | 0 orang | | | 0 orang | | |
| | | Jumlah peserta pembinaan AKI & AKB ke fasyankes Tingkat pertama & rujukan | 0 orang | | | 0 orang | | |
| | | Jumlah peserta peningkatan SDM tingkat Kota Cimahi-ANC | 0 orang | | | 0 orang | | |
| | | Jumlah peserta rapat koordinasi kesehatan | 60 Orang | | | 60 Orang | | |
| 25 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 10.608 orang | 666.000.000 | APBD, APBN | 10.608 orang | 666.000.000 | Dinas Kesehatan |
| | | Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin | 15 orang | | | 15 orang | | |
| | | Persentase penyerapan anggaran Jampersal | 0 Persen | | | 0 Persen | | |
| | | Jumlah peserta surveillance KIA, Audit Maternal Perinatal | 0 Orang | | | 0 Orang | | |
| | | Jumlah peserta konvergensi LP/ LS untuk penurunan AKI/ AKB terkait kespro & KB | 0 Orang | | | 0 Orang | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|--|
| | | Jumlah surveillance autopsi verbal kematian itu & bayi | | 0 Orang | | | 0 Orang | | |
| | | Jumlah peserta surveillance response kematian ibu & bayi | | 0 Orang | | | 0 Orang | | |
| 26 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | 10.148 orang | 120.000.000 | APBD, APBN | 10.148 orang | 120.000.000 | |
| | | Jumlah peserta pelatihan/ penyeliaan fasilitatif di puskesmas PONED | | 40 orang | | | 40 orang | | |
| | | Jumlah pendampingan bayi baru lahir resiko tinggi | | 680 orang | | | 680 orang | | |
| | | Jumlah peserta pembinaan AKI & AKB ke fasyankes tingkat pertama & rujukan | | 0 orang | | | 0 orang | | |
| 27 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | 25.380 orang | 80.000.000 | APBD, APBN | 25.380 orang | 80.000.000 | |
| | | Dokumen reviu PERDA KIBBLA | | 0 laporan | | | 0 laporan | | |
| | | Jumlah peserta kegiatan penguatan guru PAUD tentang | | 165 orang | | | 165 orang | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--|---------------|-------------|------|---------------|-------------|
| | | buku KIA & SDIDTK | | | | | | |
| | | Jumlah peserta sosialisasi PERDA KIBBLA 100 orang | | 100 orang | | | 0 orang | |
| 28 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | 69.586 orang | 213.900.000 | APBD | 69.586 orang | 213.900.000 |
| | | Jumlah peserta Pertemuan Program UKS | | 34 orang | | | 34 orang | |
| | | Jumlah Display Data hasil kegiatan UKS | | 0 unit | | | 0 unit | |
| | | Paket evaluasi sekolah sehat | | 3 paket | | | 3 paket | |
| 29 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah ASN yang mendapatkan Deteksi dini Faktor Risiko PTM | | 1.250 orang | 238.991.400 | APBD | 1.250 orang | 238.991.400 |
| | | Jumlah orang yang mendapatkan Deteksi IVA Test | | 1500 orang | | | 1500 orang | |
| | | Jumlah Jasa Petugas Penunjang P2PTM Keswa yang difasilitasi | | 1 orang | | | 1 orang | |
| | | Jumlah penduduk usia 15-59 yang mendapatkan | | 249.848 orang | | | 249.848 orang | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|------|---|-------------|--|
| | | <p>pelayanan skrining kesehatan sesuai standar</p> <p>Penguatan pandu PTM di FKTP</p> <p>Jumlah peserta kegiatan monev Usia Produktif</p> <p>Jumlah perusahaan yang mendapat sosialisasi hari Pendengaran Sedunia</p> | | <p>82 orang</p> <p>144 orang</p> <p>6 Perusahaan</p> | | <p>82 orang</p> <p>144 orang</p> <p>6 Perusahaan</p> | | |
| 30 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | <p>Jumlah penduduk usia 60 tahun atau lebih mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</p> <p>Jumlah peserta kegiatan bulan pemeriksaan lansia</p> <p>Jumlah alat/bahan kegiatan bulan pemeriksaan lansia</p> <p>Jumlah peserta Pertemuan Program Lanjut usia</p> | <p>31.781 orang</p> <p>615 orang</p> <p>13 unit</p> <p>80 orang</p> | 133.050.000 | APBD | <p>31.781 orang</p> <p>615 orang</p> <p>13 unit</p> <p>80 orang</p> | 133.050.000 | |
| 31 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah penderita hipertensi usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang mendapat | 58.026 orang | 103.670.000 | APBD | 58.026 orang | 103.670.000 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-------------|------|--|-------------|--|
| | | <p>pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Jumlah Peserta Pertemuan Program Hipertensi bagi petugas fasyankes</p> <p>Jumlah peserta skrining dan Pelayanan Hipertensi Tingkat Kota Cimahi</p> | | <p>68 orang</p> <p>3.000 orang</p> | | | <p>68 orang</p> <p>3.000 orang</p> | | |
| 32 | <p>Pengelolaan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</p> <p>Pelayanan Penderita</p> | <p>Jumlah penderita DM usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Jumlah peserta Pertemuan Program Diabetes Mellitus bagi petugas Fasyankes</p> <p>Jumlah peserta Sosialisasi dan Pelayanan DM Tingkat Kota Cimahi</p> | | <p>9.815 orang</p> <p>144 orang</p> <p>3.000 orang</p> | 103.670.000 | APBD | <p>9.815 orang</p> <p>144 orang</p> <p>3.000 orang</p> | 103.670.000 | |
| 33 | <p>Pengelolaan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</p> <p>Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</p> | <p>Jumlah penanganan dan Pendampingan ODGJ Gaduh Gelisah</p> | | 288 kali | 171.222.900 | APBD | 288 kali | 171.222.900 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------|-------------|------|-------------|-------------|--|
| | | Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | 932 orang | | | 932 orang | | |
| | | Jumlah peserta Pelatihan kesehatan jiwa bagi masyarakat | 150 orang | | | 150 orang | | |
| | | Pendampingan pelayanan kesehatan jiwa dan FGD | 26 kali | | | 26 kali | | |
| | | Jumlah peserta Pertemuan program jiwa bagi petugas puskesmas, klinik dan RS | 78 orang | | | 78 orang | | |
| | | Jumlah peserta Skrining kesehatan jiwa dan NAPZA bagi anak sekolah | 1500 orang | | | 1500 orang | | |
| 34 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah orang terduga TB yang mendapat pelayanan TB sesuai standar | 2.602 orang | 262.313.000 | APBD | 2.602 orang | 262.313.000 | |
| | | Jumlah peserta jejaring internal hospital linkage. | 30 orang | | | 30 orang | | |
| | | Jumlah Investigasi Kontak | 250 orang | | | 250 orang | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--------------|-------------|------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|---------------|--|
| | | Bulan bulan jasa tenaga Administrator Penyakit Menular | | 12 bulan | | | 12 bulan | | | | | | |
| | | Jumlah peserta Monitoring dan evaluasi program P2PM | | 76 orang | | | 76 orang | | | | | | |
| | | Jumlah peserta Sosialisasi Program TB | | 64 orang | | | 64 orang | | | | | | |
| 35 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah peserta Bimbingan teknis program | | 57 orang | 216.230.000 | APBD | 57 orang | 216.230.000 | | | | | |
| | | Jumlah bulan jasa pengelola pelayanan program HIV | | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | | | |
| | | Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar | | 6.456 orang | | | | | | 6.456 orang | | | |
| | | Jumlah peserta kegiatan mobile VCT | | 100 orang | | | | | | 100 orang | | | |
| | | Jumlah peserta Pertemuan Sosialisasi Program HIV | | 19 orang | | | | | | 19 orang | | | |
| | | Jumlah peserta pemetaan populasi risti | | 120 orang | | | | | | 120 orang | | | |
| 36 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah paket bahan pemeriksaan PCR | | 2.000 paket | | | 2.671.891.280 | | | APBD, APBN | 2.000 paket | 2.671.891.280 | |
| | | Jumlah paket bahan pemeriksaan rapid | | 10.000 paket | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|--|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | | antigen | | | | | | |
| | | Jumlah obat-obatan untuk P3K | | 1 paket | | | 1 paket | |
| | | Jumlah BHP untuk P3K | | 1 paket | | | 1 paket | |
| | | Jumlah shift kegiatan P3K dan Penanggulangan Bencana TGC | | 122 shift | | | 122 shift | |
| | | Jumlah bulan jasa tenaga administrasi pengelolaan KLB | | 12 bulan | | | 12 bulan | |
| | | Persentase realisasi anggaran hibah PMI | | 100 persen | | | 100 persen | |
| 37 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah peserta pertemuan Pelayanan Kesehatan Gizi | | 70 orang | 574.815.400 | APBD, APBN | 70 orang | 574.815.400 |
| | | Jumlah paket pengadaan PMT | | 198 paket | | | 198 paket | |
| | | Jumlah petugas pengumpulan dan pelaporan data gizi terintegrasi (TTD rematri) | | 0 Orang | | | 0 Orang | |
| | | Jumlah peserta pertemuan pengumpulan dan pelaporan data gizi terintegrasi (EPPGM) | | 0 orang | | | 0 orang | |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 38 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah kader Pos UKK yang dilatih | 30 kader | 60.884.000 | APBD, APBN | 30 kader | 60.884.000 |
| | | Jumlah Kegiatan pengelolaan program pelayanan kesehatan kerja dan olah raga | 13 kali | | | 13 kali | |
| | | Pengukuran Kebugaran Jasmani Calon Jemaah Haji Indonesia | 600 orang | | | 600 orang | |
| | | Jumlah ASN yang diperiksa kebugaran | 0 Orang | | | 0 Orang | |
| | | Jumlah karyawan instansi swasta yang diperiksa kebugaran | 0 Orang | | | 0 Orang | |
| 39 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah inspeksi Sarana Air Bersih (SAB) pada industri/fasilitas pelayanan kesehatan | 80 sampel | 475.364.000 | APBD, APBN | 80 sampel | 475.364.000 |
| | | Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | 12 bulan | | | 12 bulan | |
| | | Jumlah limbah medis yang dikelola | 12.309,46 Kg | | | 12.309,46 Kg | |
| | | Jumlah Dokumen Pelaporan Survey Study EHRA | 0 Dokumen | | | 0 Dokumen | |
| | | Jumlah peserta peningkatan kapasitas petugas sosialisasi teknis TTG SAM rumah | 0 Orang | | | 0 Orang | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|--|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|
| | | tangga bagi sanitarian | | | | | | |
| | | Jumlah Pemeriksaan sampel sarana air minum masyarakat | | 0 Sampel | | | 0 Sampel | |
| | | Jumlah peserta pertemuan pengawasan eksternal orientasi higiene sanitasi DAM untuk pengelola/penjamah | | 0 Orang | | | 0 Orang | |
| | | Jumlah Pemeriksaan sampel Depot Air Minum (DAM) | | 65 Sampel | | | 65 Sampel | |
| 40 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah jenis pengadaan Media Promosi Kesehatan | | 3 Jenis | 266.471.400 | APBD, APBN | 3 Jenis | 266.471.400 |
| | | Jumlah media promosi yang mendapatkan pemeliharaan | | 4 Unit | | | 4 Unit | |
| | | Jumlah pengadaan pendukung PIK | | 0 Unit | | | 0 Unit | |
| | | Jumlah Penyuluhan di luar gedung | | 40 kali | | | 40 kali | |
| | | Jumlah penyuluhan Mobile Promosi Kesehatan | | 12 kali | | | 12 kali | |
| | | Jumlah peserta Pembinaan dan monev | | 35 Orang | | | 35 Orang | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|------------|--|--|------------|-------------|------|------------|-------------|
| | | | program | | | | | | |
| | | | Jumlah peserta pertemuan Orientasi KPP | | 0 Orang | | | 0 Orang | |
| | | | Jumlah peserta kegiatan kampanye Lokal | | 0 Orang | | | 0 Orang | |
| | | | Jumlah peserta kegiatan Intervensi Promkes | | 0 Orang | | | 0 Orang | |
| | | | Jumlah peserta pertemuan kemitraan | | 0 Orang | | | 0 Orang | |
| | | | Jumlah Peserta pengembangan Kompetensi petugas Promke | | 30 Orang | | | 30 Orang | |
| | | | Jumlah peserta pertemuan pembinaan program promkes | | 30 Orang | | | 30 Orang | |
| 41 | Pengelolaan Kesehatan | Surveilans | Jumlah bulan jasa pengelola administrasi program surveilans | | 13 Bulan | 113.313.300 | APBD | 13 Bulan | 113.313.300 |
| | | | Jumlah peserta sosialisasi penanggulangan kasus PD3I dan Pelaporan entry data SKDR | | 0 Orang | | | 0 Orang | |
| | | | Jumlah laporan Penemuan Kasus Non | | 12 Laporan | | | 12 Laporan | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|---|-----------|-------------|------|-----------|-------------|--|
| | | PD3I | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta pertemuan kegiatan Jemaah haji | | 556 Orang | | | 556 Orang | | |
| | | Jumlah peserta pertemuan Siskohatkes | | 25 Orang | | | 25 Orang | | |
| | | Jumlah perjalanan pengawalan dan penjemputan jemaah haji | | 4 kali | | | 4 kali | | |
| | | Jumlah sampel penyelidikan epidemiologi (PE) | | 57 sampel | | | 57 sampel | | |
| | | Jumlah peserta pertemuan Evaluasi program surveilans | | 200 Orang | | | 200 Orang | | |
| | | Jumlah peserta pertemuan koordinasi pemeriksaan jemaah haji | | 0 Orang | | | 90 Orang | | |
| 42 | Pengelolaan Kesehatan Khusus | Upaya | Jumlah peserta pertemuan pengelolaan upaya kesehatan khusus | 160 Orang | 120.784.000 | APBD | 160 Orang | 120.784.000 | |
| | | | Jumlah peserta pertemuan koordinasi PIS-PK | 156 Orang | | | 156 Orang | | |
| | | | Jumlah peserta pertemuan Sistem | 100 Orang | | | 100 Orang | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--|-----------|----------------|------|-----------|----------------|
| | | Pelayanan Rujukan | | | | | | |
| | | Jumlah bulan jasa tenaga IT kegiatan PIS PK | | 13 Bulan | | | 13 Bulan | |
| 43 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah peserta pertemuan program endemik epidemik dan zoonosis | | 120 orang | 448.278.500 | APBD | 120 orang | 448.278.500 |
| | | Jumlah Kegiatan pengendalian vektor | | 80 Kali | | | 80 Kali | |
| | | Jumlah kegiatan Pendampingan pelayanan dokter spesialis pada pelaksanaan pandu PTM di Puskesmas | | 13 Kali | | | 13 Kali | |
| | | Pengadaan belanja bahan habis pakai alat kedokteran | | 1 Paket | | | 1 Paket | |
| | | Jumlah pertemuan evaluasi dan sosialisasi program ISPA, Diare, dan Hepatitis | | 57 orang | | | 57 orang | |
| | | | | | | | | |
| 44 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah anak dari keluarga miskin yang dikhitan | | 75 Orang | 18.877.786.325 | APBD | 75 Orang | 18.877.786.325 |
| | | Jumlah kegiatan verifikator dalam pengelolaan JKN | | 13 Bulan | | | 13 Bulan | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|--------------|------------|------|--------------|---------------|--|
| | | Jumlah peserta JKN yang dibayarkan oleh pemerintah daerah pembiayaan 60% | 84.296 Orang | | | 84.296 Orang | | |
| | | Jumlah peserta JKN yang dibayarkan oleh pemerintah daerah pembiayaan 40% | 84.296 Orang | | | 84.296 Orang | | |
| | | Jumlah peserta Pertemuan JKN | 70 Orang | | | 70 Orang | | |
| | | Jumlah bulan Pembayaran Pelayanan Kesehatan maskin di luar peserta JKN | 12 Bulan | | | 12 Bulan | | |
| 45 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah paket Evaluasi lingkungan bersih dan sehat | 3 Paket | 69.190.000 | APBD | 3 Paket | 69.190.000 | |
| | | Jumlah deklarasi ODF | 2 Kelurahan | | | 2 Kelurahan | | |
| | | Jumlah pembinaan kota sehat tingkat provinsi | 1 Kali | | | 1 Kali | | |
| | | Jumlah pembinaan kota sehat tk. kota | 15 Kali | | | 15 Kali | | |
| | | Jumlah peserta pertemuan koordinasi tim pembina kota sehat | 30 Orang | | | 30 Orang | | |
| | | Jumlah peserta rapat koordinasi pra ODF | 100 Orang | | | 100 Orang | | |
| 46 | Operasional Pelayanan | Jumlah jasa | 10 bulan | | APBD | 10 bulan | 8.512.000.000 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|-----------------------|---------------|------|----------------------|-------------|--|
| | Fasilitas Kesehatan Lainnya | pendampingan konsulen KIPI | | | 8.512.000.000 | | | | |
| | | Jumlah paket asuransi KIPI vaksin Covid 19 | | 1 paket | | | 1 paket | | |
| | | Jumlah pembelian Trash bag sampah medis | | 5.142 Pak | | | 5.142 Pak | | |
| | | Jumlah jenis bahan habis pakai; belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor | | 8 jenis | | | 8 jenis | | |
| | | Jumlah bulan jasa tenaga Admininstrasi/tenga ahli IT | | 10 bulan | | | 10 bulan | | |
| | | Jumlah jasa tim vaksinasi Covid 19 | | 1.060 OH | | | 1.060 OH | | |
| 48 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan penilaian re akreditasi | | 13 Unit/ Puskesmas | 800.000.000 | APBN | 0 Unit/ Puskesmas | 800.000.000 | |
| 49 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah peserta pertemuan koordinasi pelaksanaan imunisasi BIAS | | 450 Orang | 372.992.000 | APBD | 450 Orang | 372.992.000 | |
| | | Jumlah peserta pertemuan Audit KIPI | | 120 Orang | | | 120 Orang | | |
| | | Jumlah peserta pertemuan persiapan pelaksanaan vaksin | | 140 Orang | | | 140 Orang | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|-------------------|-------------|------|-------------------|-------------|--|
| | | Persentase realisasi asuransi KIPPI | | 100 Persen | | | 100 Persen | | |
| | | Jumlah peserta sosialisasi persiapan kampanye MR untuk kader | | 80 Orang | | | 80 Orang | | |
| | | Jumlah cenderamata pencaangan kampanye | | 250 unit | | | 250 unit | | |
| | | Jumlah jenis dokumentasi dan periklanan pencaangan kampanye MR | | 3 Jenis | | | 3 Jenis | | |
| | | Jumlah tenaga pendukung pelaksanaan kampanye MR dari kader | | 4 Orang/Pos | | | 4 Orang/Pos | | |
| | | Jumlah tenaga pendukung pelaksanaan kampanye dari IBI/bidan | | 4 Orang/Puskesmas | | | 4 Orang/Puskesmas | | |
| 11 | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Ketepatan waktu pelaporan Puskesmas | Cimahi | 98 Persen | 223.962.970 | APBD | 98 Persen | 223.962.970 | |
| 50 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah jenis dokumen buku Profil Kesehatan | | 2 Jenis | 19.579.000 | APBD | 2 Jenis | 19.579.000 | |
| | | Jumlah Peserta Pertemuan Penyusunan Profil | | 36 Orang | | | 36 Orang | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--|
| 51 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Bulan Jasa pemeliharaan sistem dan jaringan LAN | | 13 Bulan | 129.319.200 | APBD | 13 Bulan | 129.319.200 | |
| | | Jumlah Peserta Pertemuan Pembuatan aplikasi SIMPUS | | 92 Orang | | | 92 Orang | | |
| | | Jumlah Peserta Pertemuan Pembuatan Blue Print | | 44 Orang | | | 44 Orang | | |
| | | Jumlah pengadaan Harddisk eksternal | | 0 Unit | | | 0 Unit | | |
| | | Jasa Tenaga Pembuatan Blue Print | | 8 Bulan | | | 8 Bulan | | |
| 52 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Jumlah Pengadaan perangkat Komputer | | 5 Unit | 75.064.770 | APBD | 5 Unit | 75.064.770 | |
| | | Jumlah Pengadaan Printer | | 4 Unit | | | 4 Unit | | |
| | | Jumlah Pengadaan perangkat Laptop | | 0 Unit | | | 0 Unit | | |
| | | Jumlah Perlengkapan Video Conference | | 0 Set | | | 0 Set | | |
| | | Jumlah Camera Video | | 0 Set | | | 0 Set | | |
| 12 | Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Puskesmas dengan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Baik | Cimahi | 4 Puskesmas | 50.000.000 | APBD, APBN | 4 Puskesmas | 50.000.000 | |
| 53 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas | Jumlah peserta pertemuan Penilaian | | 45 Orang | 50.000.000 | APBD, APBN | 45 Orang | 50.000.000 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------|-------------|---------------|------|-------------|-------------|-----------------|
| | Kesehatan | Kinerja Puskesmas | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta pertemuan kegiatan Survey Kepuasan | | 45 Orang | | | 45 Orang | | |
| | | Jumlah paket penilaian Puskesmas berprestasi | | 3 Paket | | | 3 Paket | | |
| | | Jumlah puskesmas yang mengikuti pertemuan mutu puskesmas | | 6 Puskesmas | | | 6 Puskesmas | | |
| | | Jumlah puskesmas yang mengikuti Monev mutu dan akreditasi puskesmas | | 6 Puskesmas | | | 6 Puskesmas | | |
| | | Jumlah puskesmas yang melaksanakan pembinaan mutu akreditasi puskesmas | | 6 Puskesmas | | | 6 Puskesmas | | |
| | | Jumlah peserta pertemuan Akreditasi untuk Puskesmas | | 0 Orang | | | 0 Orang | | |
| III | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Tingkat Pemenuhan Standar Minimal Tenaga Kesehatan | Cimahi | 100 Persen | 2.542.400.100 | APBD | 100 Persen | 417.400.100 | Dinas Kesehatan |
| 13 | Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia | Jumlah Profil Rencana kebutuhan SDM ; | Cimahi | 1 dokumen | 2.542.400.100 | APBD | 1 dokumen | 417.400.100 | Dinas Kesehatan |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|-----------|---------------|-------|-----------|-------------|--|
| | Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 54 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Nakes Non ASN yang mendapatkan insentif | | 8.250 OH | 2.125.000.000 | APBD, | 8.250 OH | - | |
| 55 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah peserta pembinaan jabatan fungsional | | 45 Orang | 417.400.100 | APBD | 45 Orang | 417.400.100 | |
| | | Jumlah peserta pembinaan tenaga kesehatan teladan | | 90 Orang | | | 90 Orang | | |
| | | Jumlah peserta Pertemuan pembinaan SDM per profesi | | 175 Orang | | | 175 Orang | | |
| | | Jumlah Pertemuan Penyusunan informasi tenaga kesehatan | | 2 kali | | | 2 kali | | |
| | | Jumlah peserta pelatihan SDM kesehatan | | 26 Orang | | | 26 Orang | | |
| | | Jumlah jasa pengelola program informasi SDM | | 12 Bulan | | | 12 Bulan | | |
| | | Jumlah tenaga yang mendapat insentif Covid | | 0 Orang | | | 0 Orang | | |
| | | Jumlah peserta | | 50 Orang | | | 50 Orang | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|------------|-------------|------|------------|-------------|-----------------|
| | | pelatihan SDM kesehatan | | | | | | | |
| IV | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase sarana kefarmasian dan Penyediaan Makanan dan Minuman yang dibina dan sesuai standard | Cimahi | 100 Persen | 125.925.000 | APBD | 100 Persen | 125.925.000 | Dinas Kesehatan |
| 14 | Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Persentase Puskesmas yang mendapat pembinaan | Cimahi | 100 Persen | 30.000.000 | APBD | 100 Persen | 30.000.000 | |
| 56 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah peserta pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan | Cimahi | 60 Orang | 30.000.000 | APBD | 60 Orang | 30.000.000 | |
| | | Jumlah peserta pembinaan PJAS | | 70 Orang | | | 70 Orang | | |
| 15 | Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Persentase sarana IRTP yang diaudit | Cimahi | 100 Persen | 88.000.000 | APBD | 100 Persen | 88.000.000 | |
| 57 | Pengendalian dan | Jumlah peserta | | 120 Orang | | APBD | 120 Orang | 88.000.000 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------|-------------------------|-------------|------|-------------------------|-------------|-----------------|
| | Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | pertemuan PKP Jumlah sampel pemeriksaan post market yang diperiksa Jumlah sarana IRTP yang mendapatkan penyuluhan | | 50 Sampel 120 Sarana | 88.000.000 | | 50 Sampel 120 Sarana | | |
| 16 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Persenatse TPM yang mendapat rekomendasi | Cimahi | | 7.925.000 | APBD | | 7.925.000 | |
| 58 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah peserta pelatihan laik Hygiene sanitasi Tempat Pengelolaan makanan (TPM) | | 50 Orang | 7.925.000 | APBD | 50 Orang | 7.925.000 | |
| V | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Cakupan Rumah Tangga yang ber PHBS | Cimahi | 54 Persen | 409.816.000 | APBD | 54 Persen | 409.816.000 | Dinas Kesehatan |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|
| 17 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di perkantoran | Cimahi | 11 Persen | 207.000.000 | APBD | 11 Persen | 207.000.000 |
| 59 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Pembinaan dan Pengembangan SBH | | 30 Orang | 207.000.000 | APBD | 30 Orang | 207.000.000 |
| | | Pembinaan/Penguatan Kemitraan GERMAS | | 2 Kali | | | 2 Kali | |
| | | Pengiriman Kontingen SBH | | 15 Orang | | | 15 Orang | |
| | | Pertemuan Advokasi dan Penyusunan Perwal KTR | | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | |
| | | Jumlah peserta TOT implementasi KTR | | 19 Orang | | | 19 Orang | |
| 18 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan strata RW Siaga aktif minimal Purnama | Cimahi | 62 Persen | 172.872.000 | APBD | 62 Persen | 172.872.000 |
| 60 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah peserta pembinaan Pokja Kelurahan Siaga Sehat | | 70 Orang | 172.872.000 | APBD | 70 Orang | 172.872.000 |
| | | Jumlah peserta Monitoring dan evaluasi pendataan PHBS rumah tangga | | 70 Orang | | | 70 Orang | |
| | | Pembinaan RW Siaga dan evaluasi implementasi inovasi | | 15 Kelurahan | | | 15 Kelurahan | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--------|----------------------|------------------------|------|----------------------|------------------------|--|
| | | Germas | | | | | | | |
| | | Promosi kesehatan dan Penggerakan masyarakat dalam Hari Tanpa Tembakau | | 380 Orang | | | 380 Orang | | |
| | | Jumlah peserta Seminar Hari Tanpa Tembakau Sedunia | | 60 orang | | | 60 orang | | |
| 19 | Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta pembinaan UKBM | Cimahi | 120 Orang | 29.944.000 | APBD | 120 Orang | 29.944.000 | |
| 61 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah peserta Pertemuan Penyusunan Laporan Bagi Kader Jumlah peserta pembinaan UKBM | | 80 orang 40 Orang | 29.944.000 | APBD | 80 orang 40 Orang | 29.944.000 | |
| TOTAL BIDANG DAN SEKRETARIAT | | | | | 114.296.371.573 | | | 106.021.371.573 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|--------------------------------------|---------------|------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|
| | PUSKESMAS | | | | | | | | |
| 1 | Puskesmas Padasuka | | | | 2.029.174.500 | | | 2.029.174.500 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum 3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi | Cimahi | 78 Nilai 100 Persen 100 Persen | 2.029.174.500 | BLUD | 78 Nilai 100 Persen 100 Persen | 2.029.174.500 | |
| | Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80 | | 100 Persen | 2.029.174.500 | BLUD | 100 Persen | 2.029.174.500 | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Padasuka yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar) | | 12.918 orang | 2.029.174.500 | BLUD | 12.918 orang | 2.029.174.500 | Puskesmas Padasuka |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|-----------------------|
| | | 2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | 81,70 | | | 81,70 | | |
| 2 | Puskesmas Melong Asih | | | | 1.874.077.000 | | | 1.874.077.000 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Cimahi | 78 Nilai | 1.874.077.000 | BLUD | 78 Nilai | 1.874.077.000 | |
| | | 2) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum | | 100 Persen | | | 100 Persen | | |
| | | 3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi | | 100 Persen | | | 100 Persen | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80 | Cimahi | 100 Persen | 1.874.077.000 | BLUD | 100 Persen | 1.874.077.000 | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Melong Asih yang dilayani (50% dari total peserta | | 10.304 orang | 1.874.077.000 | BLUD | 10.304 orang | 1.874.077.000 | Puskesmas Melong Asih |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|--------------------------------------|---------------|------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| | | JKN terdaftar) | | | | | | | |
| | | 2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | 79,14 | | | 79,14 | | |
| 3 | Puskesmas Melong Tengah | | | | 1.036.364.500 | | | 1.036.364.500 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum 3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi | Cimahi | 78 Nilai 100 Persen 100 Persen | 1.036.364.500 | BLUD | 78 Nilai 100 Persen 100 Persen | 1.036.364.500 | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80 | Cimahi | 100 Persen | 1.036.364.500 | | 100 Persen | 1.036.364.500 | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Melong Tengah yang dilayani | | 6.143 orang | 1.036.364.500 | | 6.143 orang | 1.036.364.500 | Puskesmas Melong Tengah |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|--------------------------|
| | | (50% dari total peserta JKN terdaftar) | | | | | | | |
| | | 2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | 81,48 | | | 81,48 | | |
| 4 | Puskesmas Cigugur Tengah | | | | 1.714.924.000 | | | 1.714.924.000 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Cimahi | 78 Nilai | 1.714.924.000 | BLUD | 78 Nilai | 1.714.924.000 | |
| | | 2) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum | | 100 Persen | | | 100 Persen | | |
| | | 3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi | | 100 Persen | | | 100 Persen | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80 | Cimahi | 100 Persen | 1.714.924.000 | | 100 Persen | 1.714.924.000 | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cigugur | | 10.892 Orang | 1.714.924.000 | | 10.892 Orang | 1.714.924.000 | Puskesmas Cigugur Tengah |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|---------------------|
| | | Tengah yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar) | | | | | | | |
| | | 2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | 79,8 | | | 79,8 | | |
| 5 | Puskesmas Cimahi Selatan | | | | 1.856.114.000 | | | 1.856.114.000 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Cimahi | 78 Nilai | 1.856.114.000 | BLUD | 78 Nilai | 1.856.114.000 | |
| | | 2) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum | | 100 Persen | | | 100 Persen | | |
| | | 3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi | | 100 Persen | | | 100 Persen | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80 | Cimahi | 100 Persen | 1.856.114.000 | | 100 Persen | 1.856.114.000 | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja | | 10.752 orang | 1.856.114.000 | | 10.752 orang | 1.856.114.000 | Puskesmas Cimahi |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|------------|---------------|------|------------|---------------|-----------------|------------|
| | | Puskesmas Cimahi Selatan yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar) | | | | | | | Selatan | |
| | | 2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | 82,35 | | | 82,35 | | | |
| 6 | Puskesmas Cipageran | | | | 1.949.459.500 | | | 1.949.459.500 | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Cimahi | 78 Nilai | 1.949.459.500 | BLUD | 78 Nilai | 1.949.459.500 | Dinas Kesehatan | |
| | | 2) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum | | 100 Persen | | | | | | 100 Persen |
| | | 3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi | | 100 Persen | | | | | | 100 Persen |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80 | Cimahi | 100 Persen | 1.949.459.500 | | 100 Persen | 1.949.459.500 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|---------------------|
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cipageran yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar) | | 11.982 orang | | | 11.982 orang | 1.949.459.500 | Puskesmas Cipageran |
| | | 2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | 81,17 | | | 81,17 | | |
| 7 | Puskesmas Cimahi Tengah | | | | 2.006.923.300 | | | 2.006.923.300 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Cimahi | 78 Nilai | 2.006.923.300 | BLUD | 78 Nilai | 2.006.923.300 | |
| | | 2) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum | | 100 Persen | | | 100 Persen | | |
| | | 3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi | | 100 Persen | | | 100 Persen | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan | Cimahi | 100 Persen | 2.006.923.300 | | 100 Persen | 2.006.923.300 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|-------------------------|
| | | nilai minimal 80 | | | | | | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cimahi Tengah yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar) | | 12.481 orang | 2.006.923.300 | | 12.481 orang | 2.006.923.300 | Puskesmas Cimahi Tengah |
| | | 2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | 82,27 Nilai | | | 82,27 Nilai | | |
| 8 | Puskesmas Citeureup | | | | 1.388.284.000 | | | 1.388.284.000 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Cimahi | 78 Nilai | 1.388.284.000 | BLUD | 78 Nilai | 1.388.284.000 | |
| | | 2) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum | | 100 Persen | | | 100 Persen | | |
| | | 3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi | | 100 Persen | | | 100 Persen | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|------------|---------------|------|------------|---------------|---------------------|------------|
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80 | Cimahi | 100 Persen | 1.388.284.000 | | 100 Persen | 1.388.284.000 | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Citeureup yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar) | | 1) 9.243 | 1.388.284.000 | | 1) 9.243 | 1.388.284.000 | Puskesmas Citeureup | |
| | | 2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | 2) 82,21 | | | 2) 82,21 | | | |
| 9 | Puskesmas Cimahi Utara | | | | 2.703.335.348 | | | 2.703.335.348 | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Cimahi | 78 Nilai | 2.703.335.348 | BLUD | 78 Nilai | 2.703.335.348 | | |
| | | 2) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum | | 100 Persen | | | | | | 100 Persen |
| | | 3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian | | 100 Persen | | | | | | 100 Persen |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|------------|---------------|------|------------|---------------|------------------------|
| | | kompetensi | | | | | | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80 | Cimahi | 100 Persen | 2.703.335.348 | | 100 Persen | 2.703.335.348 | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cimahi Utara yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar) | | 14.681 | 2.703.335.348 | | 14.681 | 2.703.335.348 | Puskesmas Cimahi Utara |
| | | 2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | 82,04 | | | 82,04 | | |
| 10 | Puskesmas Pasirkaliki | | | | 719.287.000 | | | 719.287.000 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Cimahi | 78 Nilai | 719.287.000 | BLUD | 78 Nilai | 719.287.000 | |
| | | 2) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum | | 100 Persen | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------|------------|---------------|------|------------|---------------|-----------------------|
| | | 3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi | | 100 Persen | | | 100 Persen | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80 | Cimahi | 100 Persen | 719.287.000 | | 100 Persen | 719.287.000 | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Pasirkaliki yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar) | | 4.725 | 719.287.000 | | 4.725 | 719.287.000 | Puskesmas Pasirkaliki |
| | | 2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | 81,42 | | | 81,42 | | |
| 11 | Puskesmas Cibeureum | | | | 2.216.226.000 | | | 2.216.226.000 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Cimahi | 78 Nilai | 2.216.226.000 | BLUD | 78 Nilai | 2.216.226.000 | |
| | | 2) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi | | 100 Persen | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|---------------------|
| | | umum | | | | | | | |
| | | 3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi | | 100 Persen | | | 100 Persen | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80 | Cimahi | 100 Persen | 2.216.226.000 | | 100 Persen | 2.216.226.000 | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cibeureum yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar) | | 14.032 orang | 2.216.226.000 | | 14.032 orang | 2.216.226.000 | Puskesmas Cibeureum |
| | | 2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | 90,56 | | | 90,56 | | |
| 12 | Puskesmas Cibeber | | | | 1.045.759.000 | | | 1.045.759.000 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Cimahi | 78 Nilai | 1.045.759.000 | BLUD | 78 Nilai | 1.045.759.000 | |
| | | 2) Persentase Unit Kerja yang | | 100 Persen | | | 100 Persen | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------|-------------|---------------|------|-------------|---------------|-------------------|
| | | mendapatkan pelayanan administrasi umum | | | | | | | |
| | | 3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi | | 100 Persen | | | 100 Persen | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80 | Cimahi | 100 Persen | 1.045.759.000 | | 100 Persen | 1.045.759.000 | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cibeber yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar) | | 6.635 orang | 1.045.759.000 | | 6.635 orang | 1.045.759.000 | Puskesmas Cibeber |
| | | 2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | 82,61 | | | 82,61 | | |
| 13 | Puskesmas Leuwigajah | | | | 1.353.273.500 | | | 1.353.273.500 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Cimahi | 78 Nilai | 1.353.273.500 | BLUD | 78 Nilai | 1.353.273.500 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|-------------|-----------------------|--|-------------|-----------------------|----------------------|
| | DAERAH | 2) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum | | 100 Persen | | | 100 Persen | | |
| | | 3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi | | 100 Persen | | | 100 Persen | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80 | Cimahi | 100 Persen | 1.353.273.500 | | 100 Persen | 1.353.273.500 | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Leuwigajah yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar) | | 8.115 orang | 1.353.273.500 | | 8.115 orang | 1.353.273.500 | Puskesmas Leuwigajah |
| | | 2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | 81,51 Nilai | | | 81,51 Nilai | | |
| | JUMLAH PUSKESMAS | | | | 21.893.201.648 | | | 21.893.201.648 | |

BAB V

PENUTUP

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 dan Rencana Kerja Tahun 2022 ini disusun sebagai gambaran atau pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan tahun 2020 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 merupakan hasil tahun ketiga dari pelaksanaan dokumen perencanaan jangka menengah Renstra Dinas Kesehatan periode 2017-2022 yang menunjukkan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dalam perjalanannya pelaksanaan Renja tahun 2020 tentunya mengalami perubahan, terkait perubahan indikator dan target pada program dan kegiatan di tahun 2020, besarnya anggaran yang harus menyesuaikan dengan dokumen Renstra, RKPD dan RPJMD Kota Cimahi. Selanjutnya hasil evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada renja tahun 2020 akan menjadi bahan evaluasi terhadap Renstra dan RPJMD yang sekiranya akan mengalami perubahan kembali.

Dokumen penyusunan rencana kerja tahun 2022 merupakan pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) perubahan Dinas Kesehatan 2017-2022, dimana pada tahun 2021 mengalami perubahan menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan Kota Cimahi 2017-2022. Selain itu rencana kerja tahun 2022 juga mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Jawa Barat 2018-2023 dan Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2019-2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan memperhitungkan kesesuaian kebutuhan dan kekuatan yang dimiliki, sebagai upaya untuk dapat mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2022 merupakan upaya mendukung visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, yang diharapkan pada pelaksanaan program dan kegiatan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kota Cimahi maupun di lingkup Dinas Kesehatan pada khususnya.

Komitmen dan dukungan dari seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cimahi sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang telah disusun di dalam Rencana Kerja tahun 2022 ini. Kemudian Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2022 ini dapat dijadikan pedoman/acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan di Kota Cimahi.



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH
KOTA CIMAHI